

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANIAN ORGANIK
(Studi Di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

LINDA KUMALASARI
NIM. 125030107111082



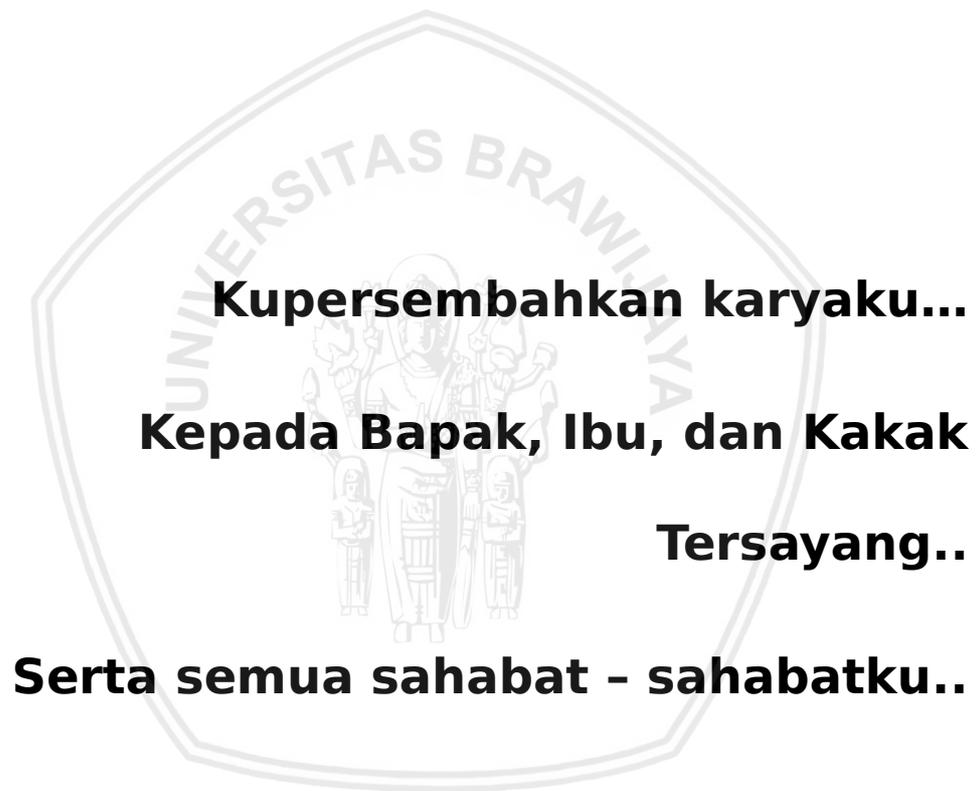
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018

MOTTO

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Yang memberi kekuatan kepadaku.

Filipi 4:13





TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pertanian Organik (Studi di Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Disusun oleh : Linda Kumalasari

NIM : 125030107111082

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : Administrasi Publik

Malang, 29 November 2018

Komisi Pembimbing


Dr. Mohammad Nuh, S.IP, M.Si
NIP. 19710828 200604 1 001


Dr. Imam Hanafi, M.Si, Ms
NIP. 19450817 197412 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 18 Desember 2018
 Jam : 08.00 WIB
 Skripsi nama : Linda Kumalasari
 NIM : 125030107111082
 Judul : Implementasi Kebijakan Pertanian Organik (Studi di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

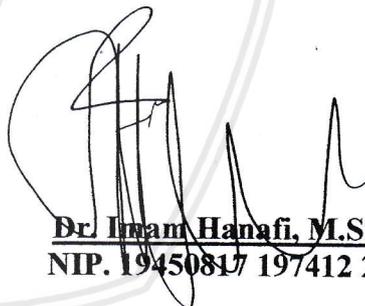
Dan dinyatakan **LULUS**
 MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



Dr. Muhammad Nuh, S.IP, M.Si
 NIP. 19710828 200604 1 001



Dr. Imam Hanafi, M.Si, Ms
 NIP. 19450817 197412 2 001

Anggota

Anggota



Dr. Sujarwoto, S.IP, M.Si, Ph.D
 NIP. 197550130 200312 1 002



Trisnawati, S.Sos, M.AP
 NIP.19800307 200801 2 012



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya. Bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 20)

Malang, November 2018



Linda Kumalasari

125030107111082

RINGKASAN

Linda Kumalasari, 2018, **Implementasi Kebijakan Pertanian Organik (Studi Di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)**. Dosen pembimbing: Ketua Dr. Mohammad Nuh, S.IP, M.Si dan Anggota Dr. Imam Hanafi, M.Si, Ms

Kebijakan pertanian organik merupakan upaya Pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan pertanian organik sebagai wujud nyata dalam rangka pembangunan pertanian berkelanjutan tertuang sebagai kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kota Batu 2012 – 2017. Adapun visi Kota Batu tahun 2012 – 2017 adalah Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional, Ditunjang Oleh Pendidikan Yang Tepat Guna dan Berdaya Saing, Ditopang oleh Sumber Daya (Alam, Manusia, dan Budaya) Yang Tangguh, Diselenggarakan Oleh Pemerintah Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai Oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Misi terkait dengan pembangunan pertanian yaitu misi ke 3: Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan hasil Pertanian Organik. Kemudian Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu ikut mensukseskan visi misi Kota Batu sehingga dijadikan program pengembangan kawasan pertanian organik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pertanian organik di Kota Batu serta hasil dari implementasi kebijakan pertanian organik tersebut.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik analisis data model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana. Maka menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pertanian organik (menurut teori Van Horn dan Van Meter) serta hasil implementasi kebijakan pertanian organik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertanian organik belum mencapai pada tahap akhir (kesejahteraan masyarakat). Namun pada tahap evaluasi program pertanian organik masih perlu perbaikan – perbaikan baik pada petani maupun Dinas Pertanian. Program pengembangan kawasan pertanian organik tersebut sumber daya manusianya terus menurun, kurang jelasnya soal pasar, beberapa petani yang sudah lama mengimplementasikan kebijakan pertanian organik juga belum mandiri. Sehingga hasil implementasi kebijakan pertanian organik tersebut adalah masih pada tahap evaluasi program pertanian organik Kota Batu, pada evaluasi program Dinas mengantisipasi kerusakan tanah, Lingkungan Hidup, dan Kesejahteraan masyarakat sampai dengan sertifikasinya lahan pertanian organik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pertanian Organik

SUMMARY

Linda Kumalasari, 2018, Implementation of Organic Agriculture Policy (Study in the Agriculture and Forestry Service of Batu City). Dr. Mohammad Nuh, S.IP, M.Si and Dr. Imam Hanafi, M.Si, Ms

Organic agriculture policy is an effort of the Batu City Government in developing organic agriculture as a concrete manifestation in the framework of sustainable agricultural development as a regional medium term development policy for Kota Batu 2012 - 2017. The vision of Batu City in 2012 - 2017 is the Batu City Center for Organic Tourism Based on International Tourism, Supported by Appropriate and Competitive Education, Supported by Resilient Resources (Nature, Human and Culture), Organized by the Government Good, Creative, Innovative, Imbued By Faith and Faith To God Almighty. Furthermore, the mission is related to agricultural development, namely mission 3: Developing Organic Agriculture and Trading the results of Organic Agriculture. Then the Batu City Agriculture and Forestry Service participated in the success of the Batu City vision and mission so that it became a program to develop organic farming areas. This study aims to describe and analyze the implementation of organic farming policies in Batu City as well as the results of the implementation of these organic farming policies.

In this study the researcher used descriptive research with a qualitative approach through interactive data analysis techniques according to Miles, Huberman and Saldana. So the focus of this research is the implementation of organic farming policies (according to the theory of Van Horn and Van Meter) and the results of the implementation of organic farming policies.

The results of the study show that the implementation of organic farming policies has not reached the final stage (community welfare). But at the evaluation stage the organic agriculture program still needs improvements - both for farmers and the Agriculture Service. The program for developing organic farming areas has continued to decline, the market is not clear enough, some farmers who have long implemented organic farming policies are also not yet independent. So that the results of the implementation of the organic farming policy are still at the evaluation stage of Batu's organic farming program, in the evaluation of the Dinas program anticipating land damage, the Environment, and the people's welfare until the certification of organic agriculture.

Key word: Implementation of Organic Agriculture Policy

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Pertanian Organik (Studi di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orangtua saya tersayang, Bapak Susiono, Ibu saya Sri Mulyati, dan kakak saya Hilda Feraita yang tidak pernah bosan memberikan dukungan materi maupun dukungan do'a dengan segenap kasih sayang dan kesabaran demi memperlancar proses penyelesaian skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. Andy Fefta, M.DA, Ph.D Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan Bapak Dr. I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP, M.AP selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik.

5. Bapak Dr. Mohammad Nuh, S.IP, M.Si dan Bapak Dr. Imam Hanafi, M.Si, Ms selaku dosen pembimbing yang selalu setia membimbing dengan sabar dan memberikan motivasi penulis serta memberikan masukan sampai tulisan ini bisa terselesaikan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi Publik yang selama ini telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Seluruh staf/pegawai Fkultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, yang telah membantu kelancara segala urusan penelitian skripsi ini.
8. Kepala Dinas pertanian dan Kehutanan Kota Batu Ibu Sri Winarni, SH. MM, Bapak Yusuf selaku kepala sub seksi Hortikultura dan semua para pegawai- pegawai lain ikut membantu dan yang sangat kooperatif dalam memberikan informasi dan sangat membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat Seperjuangan saya Bidadari Surga: Aulia Cahyani, S.AP, Yunia Mega Silvia, S.PD, Merry Christiana Sase, SST, Nabila Izzah, ST, Hikmah Gadi, S.AP serta Carolina Tyas Dewi yang selalu memberi dukungan, motivasi dan semangat untk segera menyelesaikan skripsin ini.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penulisan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam tulisan ini yang telah memberikan masukan baik kritik maupun saran serta semangat untuk bersama – sama menyelesaikan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga karya skripsi ini bermamfaat dan dapat memberikan sumbangan yang bagi pihak yang membutuhkan

Malang, 18 Desember 2018



DAFTAR ISI

MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik.....	14
1. Pengertian Kebijakan	14
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	17
3. Ciri-ciri Kebijakan Publik	19
4. Proses Kebijakan Publik.....	20
B. Implementasi Kebijakan Publik	22
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	22



2. Fungsi Implementasi Kebijakan Publik	24
3. Model-model Implementasi Kebijakan Publik.....	26
C. Sistem Pertanian Organik.....	39
1. Pengertian Sistem Pertanian Organik.....	39
2. Tujuan Sistem Pertanian Organik	41
3. Prinsip Pertanian Organik	42
4. Budidaya Pertanian Organik	43
4. Pembinaan dan Pengawasan.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Fokus Penelitian	49
C. Lokasi dan Situs Penelitian	50
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Instrumen Penelitian	55
G. Analisis Data	56
H. Keabsahan Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	63
1. Sejarah Kota Batu	63
a. Kondisi Topografi Kota Batu	64
b. Kemiringan Kota Batu.....	64
c. Jenis Lahan	65
d. Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kota Batu	65
e. Visi Misi Kota Batu 2012 – 2017.....	68
2. Gambaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.....	69
a. Visi Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu	70
b. Struktur Organisasi	71



c. Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu	71
d. Tujuan dan Sasaran.....	72
3. Program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik	76
B. Penyajian Data Fokus	80
1. Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.....	80
a. Ukuran – Ukuran Dasar dan Tujuan – tujuan Kebijakan .	81
b. Sumber – Sumber Kebijakan.....	84
c. Karakteristik Badan – Badan Pelaksana.....	89
d. Kondisi – kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik.....	94
e. Sikap Para Pelaksana	96
f. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan – Kegiatan Pelaksana	97
2. Hasil Implementasi Kebijakan Pertanian Organik meliputi...	99
a. Antisipasi Kerusakan Tanah	100
b. Lingkungan Hidup	103
c. Kesejahteraan Masyarakat	105
C. Analisa Data Fokus Penelitian	107
1. Implementasi Kebijakan Pertanian Organik Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.....	107
a. Ukuran – Ukuran Dasar dan Tujuan – Tujuan Kebijakan	110
b. Sumber – Sumber Kebijakan.....	112
c. Karakteristik Badan – Badan Pelaksana.....	114
d. Kondisi – kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik.....	116
e. Sikap Para Pelaksana	118
f. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan – Kegiatan Pelaksana	119
2. Hasil Implementasi Kebijakan Pertanian Organik meliputi:..	120
a. Antisipasi Kerusakan Tanah.....	122
b. Lingkungan Hidup	124
c. Kesejahteraan Masyarakat	126



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	129
B. Saran	135

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

No. Judul

1.	Implementasi Sebagai Proses Politik dan Administrasi.....	25
2.	Model Meter dan Horn.....	32
3.	Analisis Data Model Interaktif.....	56
4.	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu...	71
5.	Sosialisasi Pertanian Organik.....	98
6.	Hasil capaian program pengembangan kawasan pertanian organik	107



DAFTAR TABEL

No. Judul

1.	Lahan Pertanian dan Hutan Kota Batu Tahun 2015.....	65
2.	Luas Kawasan Hutan Tahun 2015	67
3.	Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu ...	72
4.	Tahap Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu.....	82
5.	Capaian Kegiatan Pertanian Organik	83
6.	Rekomendasi Kerjasama Stakeholder.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia sebagian besar bekerja disektor pertanian pada february 2017. Penduduk yang bekerja disektor pertanian sebanyak 39,68 juta orang atau 31,86% orang dibandingkan masyarakat yang bekerja disektor perdagangan 29,11 juta orang atau 23,37%, jasa kemasyarakatan 20,95 juta orang atau 16,82%, karyawan atau pegawai (38,08%), usaha sendiri (17,55%) buruh tetap (3,57%). Dari 124,54 juta orang yang bekerja pada february 2017 sebanyak 72,67 juta orang atau 58,35% bekerja disektor formal dan 51,87 juta orang atau 41,65% bekerja disektor non-formal. (<http://www.bisnis.tempo.co>, diakses tanggal; 31 maret 2018, pukul 21:48 WIB)

Sebenarnya negara ini diuntungkan karena dikaruniai kondisi alam yang mendukung, hamparan lahan yang luas, keragaman hayati yang melimpah, serta beriklim tropis dimana sinar matahari terjadi sepanjang tahun sehingga bisa menanam sepanjang tahun, (Warsani, 2013). Realita sumberdaya alam seperti ini sewajarnya mampu membangkitkan Indonesia menjadi negara yang makmur, tercukupi kebutuhan pangan seluruh warganya. Meskipun belum terpenuhi, pertanian menjadi salah satu sektor riil yang memiliki peran sangat nyata dalam membantu penghasilan devisa Negara.

Di dukungnya sumber daya alam tanah yang subur, air yang melimpah dan terdapat banyak lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian Indonesia. Tetapi dalam pengembangan sektor pertanian masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, Salah satunya adalah dengan adanya pertanian modern yang dalam pengelolaannya tergantung pada bahan kimia.

Menurut Sangatanan dalam Sutanto (2002) teknologi modern (pertanian tergantung bahan kimia) berdasarkan pertimbangan fisik dan ekonomi dianggap berhasil menanggulangi kerawanan pangan, kerusakan hutan, penurunan keragaman hayati, sanitasi, penurunan kesuburan tanah, pelonggokan (*accumulation*) senyawa kimia di dalam tanah. Sampai saat ini masih menjadi dilema berkepanjangan antara usaha meningkatkan produksi pangan dengan menggunakan produk agrokimia dan usaha pelestarian lingkungan yang berusaha mengendalikan atau membatasi penggunaan bahan-bahan tersebut. Penggunaan pupuk pabrik dan pestisida yang berlebihan dan tidak terkendali mempunyai dampak yang sama terhadap lingkungan: penggunaannya setiap waktu meningkat, kemangkusannya (*efficiency*) menurun, dan cenderung berdampak negatif terhadap lingkungan.

Kesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintesis dalam pertanian menjadikan pertanian organik menarik perhatian baik di tingkat produsen maupun konsumen. Kebanyakan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan, sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk organik:

Pola hidup sehat yang ramah lingkungan telah menjadi trend baru dan telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi (*food safety attributes*), kandungan nutrisi tinggi (*nutritional attributes*), dan ramah lingkungan (*eco-labelling attributes*). Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing di pasar internasional walaupun secara bertahap. Hal ini karena berbagai keunggulan komparatif antara lain:

- (i) masih banyak sumberdaya lahan yang dapat dibuka untuk mengembangkan sistem pertanian organik,
- (ii) teknologi untuk mendukung pertanian organik sudah cukup tersedia seperti pembuatan kompos, tanam tanpa olah tanah, pestisida hayati dan lain-lain.

Walaupun pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan dalam pengembangan pertanian organik seperti 'Go Organic 2010', namun perkembangan pertanian organik di Indonesia masih sangat lambat. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai kendala antara lain kendala pasar, minat konsumen dan pemahaman terhadap produk organik, proses sertifikasi yang dianggap berat oleh petani kecil, organisasi petani serta kemitraan petani dengan pengusaha. (Henny Mayrowani, 2013)

Masalah yang terjadi dalam sektor pertanian di Indonesia harus segera diatasi agar permasalahan tersebut tidak merugikan para petani di Indonesia. Upaya mengatasi masalah pertanian yang terjadi hingga saat ini perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah berperan penting dalam mengatasi masalah tersebut dengan membuat sebuah peraturan agar masalah tersebut dapat segera diatasi dan tidak akan berdampak negatif pada perilaku dan pendapatan petani serta kualitas lingkungan menurun. Pemerintah mempunyai kewenangan membuat kebijakan untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus benar-benar dilaksanakan agar masalah yang terjadi cepat mendapatkan jalan keluar.

Di Indonesia pertanian organik mulai populer di era 80-an. Dimana gerakan revolusi hijau yang digagas pemerintah pada akhir tahun 70-an mulai

menunjukkan dampak negatifnya. Penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia dituduh sebagai pemicu kerusakan lingkungan pertanian dan kesehatan manusia. Ada banyak dasar pemikiran yang memotivasi seorang petani mempraktekkan pertanian organik. Praktek yang paling ekstrim bahkan sangat meminimalkan intervensi manusia. Petani hanya bertugas sebagai penebar benih dan pemetik hasil saja. Ada juga yang sangat longgar, masih mentoleransi penggunaan bahan-bahan kimia sintetis tertentu apabila diperlukan. (<https://alamtani.com/pertanian-organik/>, di akses tanggal 31 maret 22:12 WIB).

Pertanian organik merupakan salah satu dari banyak cara yang dapat mendukung pelestarian lingkungan. Sistem produksi organik didasarkan pada standar produksi yang spesifik dan tepat, yang bertujuan pada pencapaian agroekosistem yang optimal dan berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi. Salah satu perwujudan pertanian organik yaitu bisa didasarkan pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan berkelanjutan selalu memperhatikan akan ekonomi, lingkungan dan sosial-budaya. Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan kepentingan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Pertanian organik adalah suatu perkenomian yang bisa membangun suatu keuangan masyarakat dengan cara menanam benih – benih yang bisa menghasilkan kualitas yang bagus dan untuk membangun perekonomian

masyarakat ke depannya. Pertanian organik adalah cara bertani yang tanpa merusak lahan untuk selanjutnya, sehingga masih bisa di gunakan untuk penanaman kembali dengan tanah yang subur dan menghasilkan buah yang sehat tanpa bahan antioksidasi atau racun. Pengembangan kawasan agropolitan, masyarakat bertindak sebagai pelaku sedangkan aparat pemerintah bertindak sebagai fasilitator (Bappeda Propinsi Jawa Timur, 2011). Salah satunya pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu terdapat pada beberapa kawasan pertanian yang kondisi fisik, sosial budaya dan ekonominya cenderung kuat mengarah ke kegiatan pertanian.

Kota Batu merupakan kota yang terletak 15 km sebelah barat Kota Malang. Banyak faktor yang mendukung Kota Batu untuk pengembangan di bidang pertanian karena kondisi fisik Kota Batu yang berupa gunung, hutan dan pertanian yang mana mendominasi tata ruang Kota Batu dan sangat sesuai dengan pengembangan lahan pertanian, yaitu sebagai penunjang perkembangan pariwisata, salah satu contohnya wisata petik apel, seiring berjalannya waktu hingga saat ini banyak dijumpai lahan pertanian yang terkontaminasi oleh zat kimia yang berlebihan sehingga pemerintah Kota Batu mengeluarkan kebijakan pertanian organik untuk meminimalisir kerusakan alam dan meningkatkan kualitas tanaman. Pengembangan pertanian tersebut terdapat masalah yang terjadi di Kota Batu, yakni belakangan ini terjadi degradasi/penurunan kualitas & produktifitas tanah, tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk & pestisida kimia, adanya residu pestisida pada tanah & produk hortikultura, dan tingginya biaya usaha tani. Permasalahan yang terjadi di Kota Batu tersebut karena petani modern sudah

tergantungan pada pupuk dan pestisida. Apabila hal tersebut terjadi terus menerus maka akan berdampak buruk pada produksi tanaman yang ada di Kota Batu.

Dari tahun 2013 hingga sekarang, Kota Batu menerapkan Peraturan Menteri no. 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik mengingat potensi Kota Batu yang sangat strategis, maka diperlukan penanganan yang lebih intensif dan terpadu untuk menuju produk tanaman pangan dan hortikultura yang sehat atau dikenal dengan sebutan “*go organic*“. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian No. 64 tahun 2013, menyebutkan bahwa sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika menguntungkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metode biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.

Penerapan sistem pertanian organik tersebut Kota Batu melalui instansi terkait yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu membuat rencana program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik untuk mewujudkan petani di Kota Batu berbasis kepariwisataan dan mengantisipasi isu kerusakan tanah, disisi lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan peraturan wali Kota Batu No.22 tahun 2014 tentang sistem pertanian organik, pemerintah menimbang bahwa sistem pertanian konvensional dengan menggunakan pupuk

dan pestisida sintesis lebih banyak menghasilkan dampak yang menimbulkan kerusakan lingkungan, residu pestisida dalam bahan makanan, berbahaya pada kesehatan manusia, dan peningkatan ketahanan hama terhadap pestisida, sehingga perlu adanya upaya terhadap pengembangan pertanian organik serta mendukung pembangunan dan pengembangan pertanian organik di Kota Batu, perlu dibangun suatu sistem pertanian organik dengan menumbuhkan kembangkan dunia usaha dan memberdayakan masyarakat agar mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan.

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu membuat program pengembangan kawasan pertanian organik membantu mensukseskan Visi Misi Kota Batu yang sudah di mulai sejak tahun 2010, namun pada tahun tersebut petugas penyuluh lapang masih memperkenalkan dan menerapkan beberapa daerah pertanian organik. Setelah munculnya Visi Misi Kota Batu tahun 2012 – 2017 adalah **Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional, Ditunjang Oleh Pendidikan Yang Tepat Guna dan Berdaya Saing, Ditopang Oleh Simber Daya (Alam, Manusia, dan Budaya) yang Tangguh, Diselenggarakan Oleh Pemerintah Yang Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai Oleh Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Misi terkait dengan pengembangan pertanian organik yaitu misi ke – 3 : Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik.** Dinas mulai membuat program Pengembangan Kawasan dan menerapkan pada petani di Kota Batu pada tahun 2012: 4 desa sampai dengan tahun 2016 menjadi 14 desa. Pada tahun 2017 sampai dengan saat ini Kota Batu

terus mengevaluasi program pertanian organik di Kota Batu, karena hasil pada implementasi pertanian organik di Kota Batu belum cukup dikatakan berhasil.

Oleh karena itu diharapkan dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya yang meliputi seluruh urusan pemerintahan yang dimiliki; mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, mudah, cepat, transparan, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah Kota Batu membuat dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja setiap tahun.

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kota dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan pembangunan Kota Batu secara terpadu. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Kota Batu Sebagai Sentra Pertanian Organik
2. Kota Batu sebagai Pariwisata Internasional
3. Pertanian dan Pariwisata Didukung Pendidikan
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Manusia, dan Budaya yang Baik
5. Pemerintah Batu yang Baik, Kreatif dan Inovatif

Untuk mewujudkan target utama tersebut tidak mudah karena banyak permasalahan dan tantangan dalam pembangunan pertanian. Sejalan dengan Agenda Nasional Pengembangan Pertanian Organik, potensi pertanian serta

kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya pertanian Kota Batu, maka Pemerintah Kota Batu sangat mendukung pengembangan pertanian organik. Berdasarkan uraian diatas, dalam mengatasi masalah pada bidang pertanian di Kota Batu maka pemerintah Kota Batu melalui instansi terkait yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu harus menerapkan sebuah peraturan menteri pertanian. Sehingga peneliti tertarik untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penerapan peraturan menteri tentang sistem pertanian organik untuk menulis skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pertanian Organik (Studi Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pertanian organik di Kota Batu?
2. Apa sajakah hasil implementasi kebijakan pertanian organik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dari rumusan masalah di atas, maka rumusan dalam peneliti ini antara lain :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan implementasi kebijakan pertanian organik

2. Untuk mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan hasil implementasi kebijakan dalam penerapan kebijakan pertanian organik

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis kepada pihak – pihak yang terkait khususnya dan bagi para pembaca umumnya:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah bagi pengembangan Ilmu Administrasi.
 - b. Memberikan informasi bagi peneliti berikutnya untuk menjadikan bahan pertimbangan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sama.
2. Kontribusi Empirik
 - a. Bagi Mahasiswa
 - (1) Penelitian ini diharapkan mampu melatih mahasiswa dalam menerapkan teori – teori yang telah didapat selama perkuliahan untuk dikaji di lapangan selama penelitian serta meningkatkan kemampuan berpikir dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.
 - b. Bagi Perguruan Tinggi

- (1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian lanjutan.
- (2) Dengan melakukannya penelitian ini, merupakan wujud tri darma perguruan tinggi berupa penelitian yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah demi kemashalatan bersama.

c. Bagi Pemerintah

- (1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran sebagai baha masukan bagi pemerintah Daerah, maupun pemerintah Desa dalam upaya pertanian organik.
- (2) Bagi pemerintah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga potensi – potensi yang ada di Kota Batu dapat dimanfaatkan baik bagi terselenggarakannya sistem pertanian organik.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang dilaksanakannya penelitian yang merupakan pijakan dari pemilihan judul skripsi yaitu Implementasi Kebijakan

Pertanian Organik (Studi di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu). Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah yang akan diteliti dalam rangka membatasi peneliti, kemudian dijelaskan juga mengenai tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik secara akademis maupun praktis, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dasar teori atau landasan berpijak yang digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai alat untuk melakukan analisa dan intepretasi data penelitian. Landasan yang digunakan berkaitan dengan teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, pertanian organik, baik yang mengacu pada teori maupun peraturan yang telah ada. Teori maupun landasan hukum tersebut digunakan untuk menganalisis data lapangan baik berupa data primer maupun sekunder.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis.

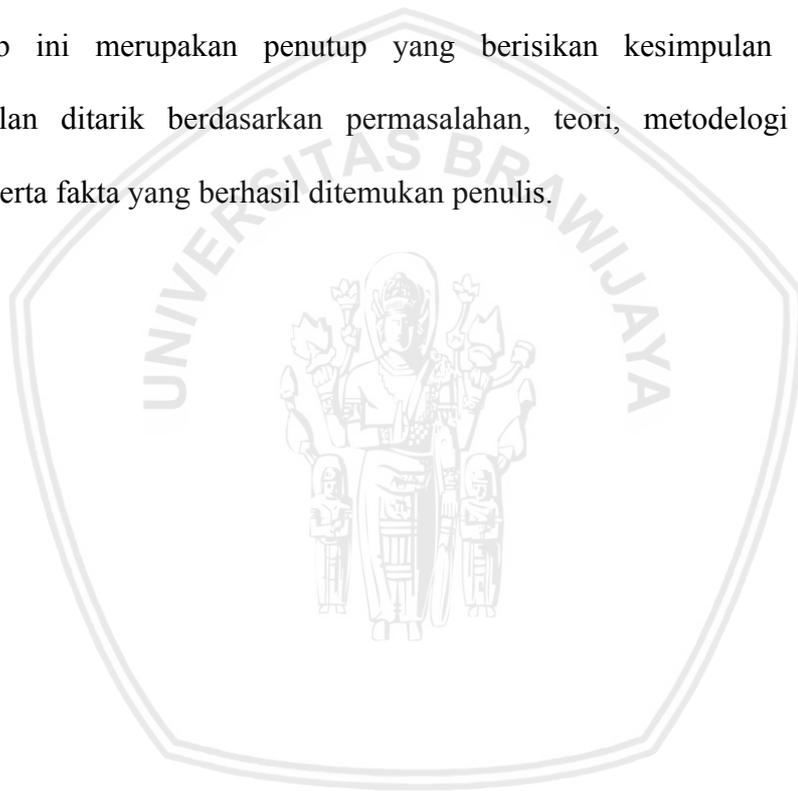
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan yang berisi analisis dalam permasalahan – permasalahan yang telah dituangkan dalam bab I. Oleh karena itu dapat dikatakan

bab IV merupakan langkah selanjutnya demi menganalisis topic dan fenomena yang diteliti berdasarkan teori yang telah dipaparkan dalam Bab II. Bab IV berisikan penyajian dan menganalisis mengenai implementasi kebijakan pertanian organik di Kota Batu.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik berdasarkan permasalahan, teori, metodologi penelitian, analisis serta fakta yang berhasil ditemukan penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Abdul Wahab (2011, h. 15) menjelaskan makna yang termuat dalam terminologi (istilah) kebijakan (*policy*) sesungguhnya tidak cuma bersifat tekstual, melainkan lebih bersifat kontekstual, karena dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Oleh sebab itu maknanya tidaklah homogen. Makna itu dalam realita bisa jadi beragam mengikuti dinamika aksi sosio-ekonomi dan politik yang terjadi disekitar kita dan persepsi yang diberikan oleh orang terhadapnya. 10 penggunaan istilah “kebijakan” dalam pengertian modern menurut Hogwood (Parsons, 2006, h. 15) adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai lebel untuk sebuah bidang aktivitas
- b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
- c. Sebagai proposal spesifik
- d. Sebagai keputusan pemerintah
- e. Sebagai otorisasi formal
- f. Sebagai sebuah program
- g. Sebagai output
- h. Sebagai “hasil” (*outcome*)

- i. Sebagai teori atau model
- j. Sebagai sebuah proses

Banyak pendapat para ahli tentang kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh H. Helco dalam memberikan pengertian tentang Kebijakan sebagai berikut : *“policy is not...self evident term”* (kebijakan bukanlah sebuah istilah yang jelas dengan sendirinya), karena itu Helco menyarankan, dan sekaligus menunjukkan, bahwa “kebijakan itu lebih baik jika dipandang sebagai tindakan yang sengaja dilakukan atau ketidakmauan untuk bertindak secara sengaja dari pada di pandang sebagai keputusan-keputusan atau tindakan - tindakan tertentu” (H.Helco dalam Abdul Wahab, 2011, h. 35).

Namun apa yang dimaksudkan dengan istilah kebijakan (*policy*) itu sendiri masih terjadi silang pendapat diantara para ahli. Pendapat lain dikemukakan WI. Jenkins yang memandang kebijakan sebagai berikut : *“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within aspecified situation where these decision should, in principle, be within thepower of these actors to achieve”* (serangkaian keputusan-keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut) (WI. Jenkins dalam Abdul Wahab, 2008, h. 4). Menurut lembaga dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (1975) telah memberikan makna kebijakan sebagai berikut : “Kebijakan ialah pedoman

untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana” (*United Nation* dalam Abdul Wahab, 2008, h. 2)

Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan yang terjadi seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Friedrich dalam Abdul Wahab, 2008, h. 3). Pendapat lain yang dikemukakan oleh Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*) (Titmuss dalam Suharto, 2008, h. 7).

Demikian dapat disimpulkan makna kebijakan menurut para ahli bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya melakukan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah yang sedang terjadi.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Makna kebijakan publik (*public policy*) ternyata dimaknai dan dirumuskan secara beragam. Dalam buku Parsons yang berjudul “*Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*” menjelaskan, Kebijakan publik adalah bidang yang lebih cenderung didefinisikan berdasarkan lingkup atau sektor kebijakan, dan dalam sebagian besar cara ini terjadi interaksi antar disiplin dan antar-instansi. Beberapa area penting dalam kebijakan publik menurut Parsons (2006, h. 32-33) antara lain :

1. Kesehatan;
2. Transportasi;
3. Pendidikan;
4. Lingkungan;
5. Kebijakan Sosial;
6. Perumahan;
7. Kebijakan Ekonomi;
8. Ras;
9. Perencanaan Tata Kota

Dalam masing-masing lingkup ini terdapat jaringan dan komunitas riset spesialis yang membahas masalah-masalah dan kebijakan serta mendukung ide-ide. Menurut R.S. Parker dalam Abdul Wahab (2011, h. 46) menyebutkan bahwa kebijakan publik itu adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang

krisis. Dalam pendapat Nugroho (2006, h. 182), kebijakan publik adalah ukuran dari kinerja pemerintahan. Pemerintah yang unggul atau bodoh, amatiran atau profesional, dicerminkan dari kualitas kebijakan publik yang telah dibuat dan sudah dilaksanakan.

Anderson (1970) mengatakan "*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*" ("Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah"). Menurut James E. Anderson (Islamy, 2009, h. 19) implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah :

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat – pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti : merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

3. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. David Easton menyebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik. Ciri-ciri kebijakan publik sebagai berikut :

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai pelaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem-sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Dalam bentuk yang negatif, ia

kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah justru diperlukan. (David Easton dalam Abdul Wahab, 2008, h. 5-7)

4. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak lahir begitu saja tetapi kebijakan publik lahir melalui proses atau tahapan yang panjang. Thomas R. Dye memberikan pendapat proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut:

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apayang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik). (Widodo, 2012, h. 16-17).

Uraian diatas dapat dijelaskan bahwa dalam proses kebijakan merupakan aktivitas dimana sebuah masalah diidentifikasi apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Setelah ditemukan sebuah masalah dirumuskan sebuah kebijakan untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut agar masalah tidak terjadi terus menerus. Apabila kebijakan sudah dirumuskan dan disahkan oleh pembuat kebijakan, maka kebijakan tersebut diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Implementasi kebijakan dilakukan untuk melihat apakah kebijakan yang dibuat tersebut dapat menyelesaikan masalah atau tidak. Apa saja dampak yang terjadi dari sebuah kebijakan tersebut. Kebijakan yang sudah diimplementasikan harus dievaluasi untuk menilai bagaimanakah kebijakan tersebut apakah gagal atau berhasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada umumnya merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Implementasi kebijakan sebagai ukuran berhasil atau tidak sebuah kebijakan itu dibuat. Hal ini diungkapkan Jenkins:

“Studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda” (Parsons, 2006, h. 463).

Jones mengartikan implementasi sebagai *getting the job done “and” doing it*. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sederhana. Akan tetapi, dengan kesederhanaan rumusan seperti itu tidak berarti implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang telah dilakukan dan melakukan kegiatan dengan mudah. Menurut Jones pelaksanaannya menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resources* (Widodo, 2012, h. 86).

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari penjelasan bahwa implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses untuk melaksanakan sebuah keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Dalam implementasi kebijakan disediakan sebuah sarana prasarana untuk menunjang keberhasilan sebuah implementasi kebijakan (Abdul Wahab, 2008, h. 64).

Van Meter dan Van Horn (Abdul Wahab, 2008, h. 65) merumuskan proses implementasi sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan Mazmanian dan Sabatier menjelaskan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik, baik itu yang menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa” (Abdul Wahab, 2011, h. 158).

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan sebuah keputusan yang telah disepakati sesuai dengan tujuan. Implementasi kebijakan dilakukan untuk menilai berhasil atau tidak sebuah kebijakan tersebut dibuat dan apa dampak dari kebijakan tersebut. Keputusan kebijakan tersebut (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

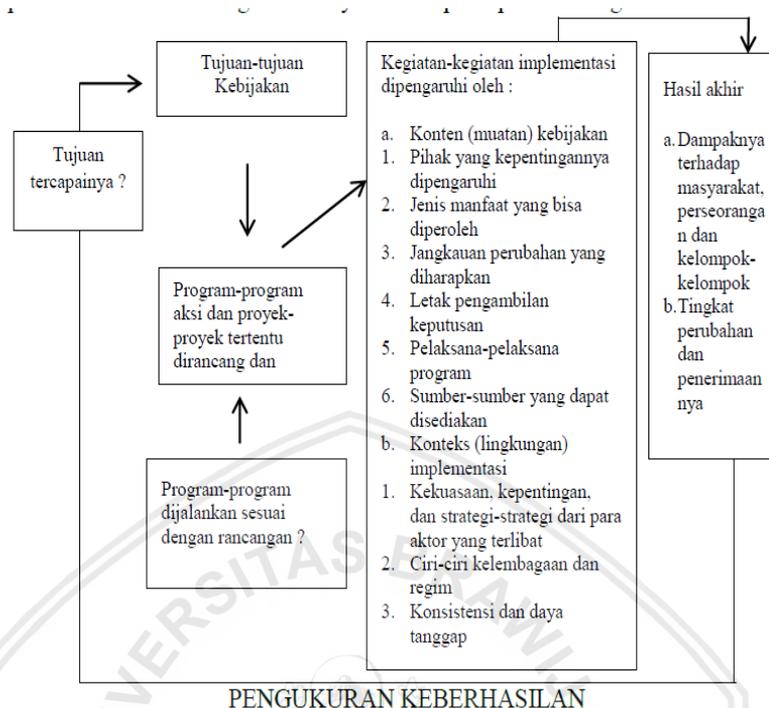
2. Fungsi Implementasi Kebijakan Publik

Fungsi dari implementasi secara garis besar merupakan menciptakan suatu hubungan yang tujuan maupun sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Mencakup pula sistem penyampaian/penerusan kebijakan publik yang terdiri dari cara dan sarana tertentu yang dirancang secara khusus dan diarahkan untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Implementasi itu mencakup “*a process*

of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps” dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang menuju sebuah tujuan kebijakan dengan cara administrasi dan politik (Cleaves dalam Abdul Wahab 2011, h. 161).

Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan/mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Diagram yang disusun oleh Grindel ini kiranya proses implementasi kebijakan publik beserta cara mengevaluasinya akan dapat dipahami dengan mudah.



Gambar 1: Implementasi Sebagai Proses Politik dan Administrasi
 Sumber : Grindle dikutip Abdul Wahab (2011, h. 161)

Dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan oleh Grindle tersebut dengan demikian jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Inilah syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun (Abdul Wahab, 2011, h. 162). Tanpa adanya syarat-syarat tersebut maka kebijakan publik entah dalam bidang kesehatan masyarakat, perumahan rakyat, land reform, pendidikan ataupun pembangunan pedesaan terpadu boleh dikatakan hanya sebagai slogan politik.

Secara teori, pada tahap implementasi proses perumusan kebijakan dapat digantikan dengan proses implementasi kebijakan dan program-program lainnya

di aktifkan. Tetapi dalam praktek, perbedaan antara perumusan dan implementasi kebijakan sulit untuk dipertahankan, karena umpan balik dari prosedur-prosedur implementasi mungkin menyebabkan diperlukannya perubahan tertentu pada tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Aturan yang telah ditetapkan/dirumuskan perlu di tinjau kembali yang menyebabkan peninjauan ulang terhadap perumusan kebijakan pada segi implementasinya. Proses implementasi sebagian besar dipengaruhi oleh tujuan-tujuan yang dirumuskan. Proses implementasi merupakan suatu hal yang sangat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan apabila tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik proses implementasinya, maka tujuan dari implementasi tersebut tidak terwujud sesuai dengan apa yang diinginkan.

3. Model-model Implementasi Kebijakan

a. Edward III mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor, yaitu:

a. Komunikasi (*communication*)

Faktor komunikasi, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran

(*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

b. Sumber Daya (*resources*)

Faktor ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III menegaskan bahwa : “Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif” (Widodo, 2012, h. 98). Sumberdaya sebagaimana telah disebutkan meliputi

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang penting dalam keberhasilan dan kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Sumber daya manusia pelaku kebijakan (*implementators*) tersebut juga membutuhkan informasi yang cukup tidak saja berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti penting (*esensi*) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan (*rules and regulations*) berlaku.

b. Sumber daya Anggaran

Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran mempengaruhi efektifitas pelaksanaan implementasi kebijakan. Sumber daya anggaran digunakan untuk membiayai operasional dari implementasi kebijakan. Program dari pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan optimal apabila sumberdaya anggara terbatas. Selain itu menyebabkan disposisi pelaksana kebijakan sangat rendah menyebabkan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana prasarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan. Sumber daya peralatan tersebut berupa gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan karena dengan terbatasnya fasilitas yang sudah using terutama teknologi informasi menyebabkan kesulitanmendapatkan informasi. Terbatasnya sumber daya peralatan menyebabkan kurangnya motivasi para pelaku untuk melaksanakan sebuah kebijakan.

d. Sumber daya Informasi dan Kewenangan

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sumber daya informasi merupakan sumber daya yang sangat penting untuk menyampaikan bagaimana implementasi kebijakan. Informasi sangat penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan agar mereka dapat melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Edward III menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting ketika ada sebuah masalah yang harus segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Manakala lembaga tersebut tidak diberi kewenangan untuk membuat keputusan sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, bukan hanya lembaga tersebut yang merosot di mata masyarakat tetapi jauh lebih dari itu masalah yang terjadi tidak segera diselesaikan. Bisa jadi penyelesaian masalah tidak yang ada kurang sesuai dan tepat karena yang membuat keputusan bukan lembaga yang tahu masalahnya. Pelaku utama kebijakan harus diberi kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi bidang kewenangannya.

c. Disposisi (*dispositions*)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan ini

akan menimbulkan sikap menerima (*acceptance*), acuh tak acuh (*neutrality*), dan mencolak (*rejection*) terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementators*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur organisasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (organisasi yang terpecah-pecah) dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang.

(Edward III dalam Widodo, 2012, h. 96-107)

b. Implementasi Van Meter dan Van Horn dalam buku *The Policy*

Implementation Procces: A Concepcual Framework, menjelaskan bahwa:

“implementasi adalah tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

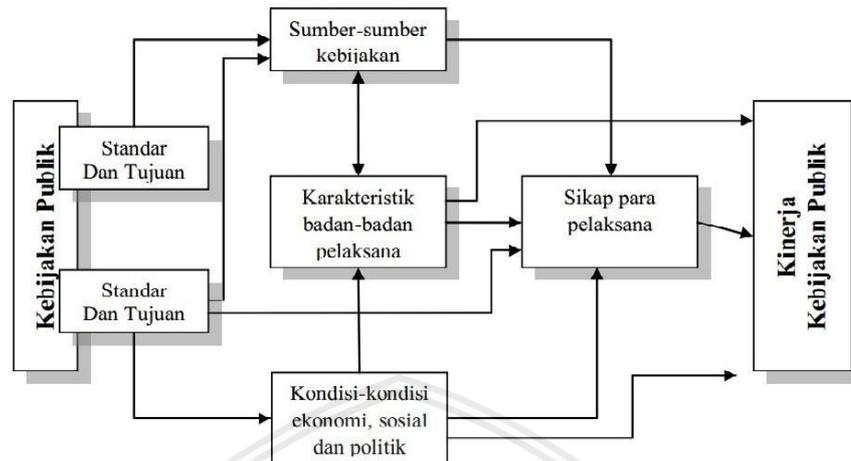
digariskan dalam keputusan kebijakan” (Meter dan Van horn, dalam Abdul wahab 2008 h. 447)

Jadi, Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Berdasarkan pengertian implementasi di atas Van Meter dan Van Horn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut *A Model of The Policy Implementation*, yaitu:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;
2. Sumber-sumber kebijakan;
3. Karakteristik badan-badan pelaksana;
4. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik;
5. Sikap para pelaksana;
6. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana; (Meter dan Van Horn, dalam Adbul Wahab 2008, h. 462-478)

Gambar 2. Model Meter dan Horn



(Sumber: Meter dan Van Horn, dalam Abdul wahab 2008)

Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja publik.

Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

Kedua, menurut Van Meter dan Van Horn, sumberdaya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Waktu merupakan

bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau cirri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan/instansi pelaksananya.

Subarsono mengungkapkan kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah peningkatan pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006, h.7). Komponen dari model ini terdiri dari struktur-struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka, disamping itu perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pameran-pameran serta dalam penyampaian kebijakan.

Keempat, dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Van Meter dan Van Horn mengungkapkan:

“sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik. Dukungan sumber daya ekonomi dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan dalam

lingkungan keberhasilan implementasi kebijakan” (Neter dan Van Horn, dalam Abdul wahab 2008, h. 471)

Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi cara pelaksanaan program, variasi-variasi dalam situasi politik berpengaruh terhadap pelaksana kerja. Peralihan pemerintah dapat mengakibatkan perubahan-perubahan dalam cara pelaksanaan kebijakan-kebijakan tanpa mengubah kebijakan itu sendiri.

Kelima, Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang lebih ditetapkan sebelumnya.

Keenam, Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki efek tidak langsung pada kinerja, apa pengaruh ini terhadap variabel dependen ditengahi oleh variabel independen lain. Jelas yang memberikan pelayanan publik akan dipengaruhi oleh cara yang standar dan tujuan komunikasi untuk pelaksana dan sejauh mana standar dan tujuan memfasilitasi pengawasan dan penegakan hukum. Standar dan tujuan

tidak langsung berdampak pada disposisi pelaksana melalui kegiatan komunikasi interorganisasi.

Hubungan antara sumber daya dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari yuridiksi menerapkan (atau organisasi) menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya fiskal dan lainnya dapat menciptakan permintaan oleh warga negara swasta dan terorganisir kelompok-kelompok kepentingan untuk partisipasi dalam dan implementasi berhasil dari program. Prospek manfaat dari program ini dapat menyebabkan kelompok dinyatakan diam untuk menekan partisipasi maksimum. Berdasarkan sumber daya terbatas yang tersedia, warga negara kepentingan pribadi dan terorganisir dapat memilih untuk menentang kebijakan atas dasar bahwa manfaat dari partisipasi sedikit dibandingkan dengan biaya potensial.

- b. Model kerangka analisis implementasi (*A framework for implementation analysis*) yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) dikutip oleh Nugroho (2006, h. 129-130) yang mengklarifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu :
- a. Pertama, variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
 - b. Kedua, variabel *intervening*, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana, dan keterbukaan kepada pihak luar; dan

variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan *resources* dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

- c. Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kebutuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut atau keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.
- d. Model Hoogwood dan Gun dikutip oleh Nugroho (2006, h. 130-132), menurut mereka, untuk mengimplementasikan kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:
1. berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar;
 2. apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu;
 3. apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada;
 4. apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal;
 5. seberapa banyak hubungan saling ketergantungan kecil;
 6. pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
 7. bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar;
 8. komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
 9. pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna'.

Model ini mengacu pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pokok.

- e. Model Grindle dikutip oleh Nugroho (2006, h.132-134) yang mempunyai ide dasar bahwa implementasi dilakukan setelah kebijakan ditransformasikan dan keberhasilannya ditentukan oleh *implementability* kebijakan tersebut. Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan mencakup:
- a) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan.
 - b) Jenis manfaat yang dihasilkan.
 - c) Derajat perubahan yang diinginkan.
 - d) Kedudukan pembuat kebijakan.
 - e) Pelaksana program.
 - f) Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
 - b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
 - c) Kepatuhan dan daya tanggap.
- f. Model Elmore (1979), Lipsky (1971) dan Hjern dan Porter (1981) dikutip oleh Nugroho (2006, h.134-135) yang memulai implementasi dengan mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tentang tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model ini mengacu pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau keterlibatan pejabat pemerintah rendah. Maka dari itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan juga sesuai dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya dipelopori oleh

masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

- g. Model Goggin, Bowman, dan Lester (1990) dikutip oleh Nugroho (2011, h.633) yang biasanya disebut sebagai *communication model* untuk implemetasi kebijakan. Gogging dan kawan-kawan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan menggunakan metode penelitian dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, *dependen* dan faktor komunikasi digunakan sebagai penggerak implementasi kebijakan.
- h. Model Hakamura & Smalwood dikutip oleh Nugroho (2011, h.637) yang biasa disebut *environment influencing implementations* yang terdiri dari tiga elemen dan masing-masing mempunyai *actors* dan *arenas*.

C. Sistem Pertanian Organik

1. Pengertian Sistem Pertanian Organik

Menurut Mulyadi (2007, h.9) sistem merupakan komponen-komponen yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama digunakan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Menurut Gordon B. Davis dalam Haryadi (2009, h.23) sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Sedangkan menurut Raymond Mcleod dalam Haryadi (2009, h.24) sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Sesuai dengan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem yaitu sesuatu yang saling berkaitan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah direncanakan. Di dalam sistem ada interaksi dan saling

kerjasama antara komponen dengan lingkungannya. Sistem digunakan untuk mengatur serta memberi arah untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan.

Istilah “pertanian” merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dipanen dengan cara menanam tanaman. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan menanam tanah dengan tanaman yang menggunakan campur tangan manusia terhadap tumbuhan. Belakangan ini campur tangan manusia semakin sedikit digunakan karena pertanian modern lebih sering menggunakan bahan kimia pertanian. Salikin (2003, h.51) bahwa pertanian organik merupakan salah satu cara alternatif solusi atas kegagalan sistem pertanian industrial. Pertanian organik bertajuk pertanian ramah lingkungan atau pertanian yang alami untuk mengurangi pertanian yang menggunakan bahan kimia yang belakangan ini terjadi.

Istilah yang pertama “pertanian alami” mengisyaratkan kekuatan alam mampu mengatur pertumbuhan tanaman, sedang campur tangan manusia tidak diperlukan sama sekali. istilah yang kedua "pertanian organik" campur tangan manusia lebih intensif untuk memanfaatkan lahan dan berusaha meningkatkan hasil berdasarkan prinsip daur ulang yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi setempat. Istilah pertanian organik menghimpun seluruh imajinasi petani dan konsumen yang secara serius dan bertanggung jawab menghindari bahan kimia dan pupuk yang bersifat meracuni lingkungan dengan tujuan untuk memperoleh kondisi lingkungan yang sehat. Mereka juga berusaha untuk menghasilkan produksi tanaman yang berkelanjutan dengan cara memperbaiki kesuburan tanah

menggunakan sumber daya alamai seperti mendaur ulang limbah pertanian. Dengan demikian pertanian organik merupakan suatu gerakan “*kembali ke alam*”. (Susanto, 2002, h.19-20).

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik mengandung pengertian bahwa Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika menguntungkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metode biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintetis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem. dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metode biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintetis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.

Jadi, sistem pertanian organik merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk pengembangan pertanian yang ramah lingkungan. Sistem ini dibuat berusaha untuk mengembalikan semua jenis bahan organik ke dalam tanah. Dalam pengembangan sistem pertanian organik tidak boleh adanya bahan kimia untuk pengembangannya melainkan dari bahan-bahan alami agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan bahan makanan yang dihasilkan oleh tanaman organik dapat menyehatkan manusia.

2. Tujuan Sistem Pertanian Organik

Dalam ketentuan pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013, menyatakan tujuan di tetapkannya sistem pertanian organik, yaitu :

- a. Mengatur pengawasan organik Indonesia.
- b. Memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- c. Memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik.
- d. Membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur.
- e. Memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan.
- f. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

3. Prinsip Pertanian Organik

Menurut FOAM (2008), prinsip-prinsip pertanian organik adalah :

- a. Prinsip Kesehatan

Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem. Tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman yang sehat yang dapat mendukung kesehatan hewan dan manusia. Peran pertanian organik dalam produksi, pengolahan, distribusi, dan konsumsi bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kesehatan ekosistem dan organisme, dari yang terkecil yang berada di dalam tanah hingga manusia, serta dimaksudkan untuk menghasilkan makanan bermutu tinggi dan bergizi yang mendukung

pemeliharaan kesehatan, dan kesejahteraan, sehingga harus dihindari penggunaan pupuk pestisida yang dapat berefek merugikan kesehatan.

b. Prinsip Ekologi

Pertanian organik dapat mencapai keseimbangan ekologis melalui pola system pertanian, membangun habitat, pemeliharaan keragaman genetika, dan pertanian. Sehingga dapat memberikan keuntungan bagi lingkungan secara umum, termasuk di dalamnya tanah, iklim, habitat, keragaman hayati, udara dan air.

c. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menenkan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan seperti petani, pekerja, pemroses, penyalur, pedagang, dan konsumen.

d. Prinsip Perlindungan

Prinsip ini menyatakan bahwa pencegahan dan tanggung jawab merupakan hal dasar dalam pengelolaan, pengembangan dan pemilihan teknologi di pertanian organik.

4. Budidaya Pertanian Organik

Sesuai dengan pasal 5 Bab II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013, menyebutkan budidaya pertanian organik untuk produk asal tanaman harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran I , yaitu :

1. Lahan dan penyiapan lahan

a. Unit usaha harus memiliki catatan riwayat penggunaan lahan;

- b. Lahan bekas pertanian konvensional harus mengalami periode konversi paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penebaran benih, atau untuk tanaman tahunan selain padang rumput, paling sedikit 3 (tiga) tahun sebelum panen hasil pertama produk organik atau paling sedikit 12 (dua belas) bulan untuk kasus tertentu. Dalam hal seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka boleh dikerjakan secara bertahap;
- c. Padang rumput sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan suatu lahan yang ditumbuhi rumput liar (tidak dibudidayakan) tanpa asupan bahan-bahan kimia sintesis sehingga tidak memerlukan masa konversi;
- d. Dalam hal seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka boleh dikerjakan secara bertahap;
- e. Areal yang dalam proses konversi, dan areal yang telah dikonversi untuk produksi pangan organik tidak boleh diubah (kembali seperti semula atau sebaliknya) antara metode produksi pangan organik dan konvensional;
- f. Tidak menyiapkan lahan dengan cara pembakaran, termasuk pembakaran sampah.

2. Benih

- a. Harus berasal dari tumbuhan yang ditumbuhkan secara organik;
- b. Apabila benih organik tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka :

- 1) Pada tahap awal dapat digunakan benih tanpa perlakuan pestisida sintetis;
- 2) Benih yang sudah mendapat perlakuan pestisida sintesis, perlu dilakukan tindakan pencucian untuk meminimalkan residu pestisida sintesis.

3. Sumber Air

- a. Berasal dari sumber mata air yang langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan cemaran lain yang membahayakan;
- b. Air yang berasal selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus telah mengalami perlakuan untuk mengurangi cemaran;
- c. Penggunaan air harus sesuai dengan prinsip konservasi.

4. Pengelolaan Kesuburan Tanah

Memelihara dan meningkatkan kesuburan dan aktivitas biologis tanah dengan cara penanaman kacang-kacangan (*leguminiceae*), pupuk hijau atau tanaman berakar dalam melalui program rotasi tahunan yang sesuai. Mencampur bahan organik ke dalam tanah baik dalam bentuk kompos maupun segar dari unit usaha budidaya. Produk samping peternakan, seperti kotoran ternak, boleh digunakan apabila berasal dari peternakan yang dibudidayakan secara organik.

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Pemeliharaan Tanaman Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) merupakan bagian dari agroekosistem yang dapat mengganggu tanaman yang keberadaannya dapat

berpengaruh dalam siklus biologi (daur materi, siklus energy). Apabila tidak ada cara untuk mengendalikan OPT maka budidaya pertanian organik tidak akan berjalan dengan baik karena tanaman organik akan di ganggu dengan hama, penyakit dan gulma. Cara pengendalian OPT dan pemeliharaan tanaman dilakukan dengan :

- a. Tidak menggunakan bahan kimia sintetis dan organisme atau produk hasil rekayasa genetika
- b. Tidak melakukan proses pembakaran dalam pengendalian gulma
- c. Menerapkan sistem pengendalian hama dan penyakit yang terpadu sehingga dapat menekan kerugian akibat organisme pengganggu tanaman.
- d. Organisme pengganggu tanaman harus dikendalikan dengan salah satu atau kombinasi dari cara seperti berikut :
 - 1) Pemilihan varietas yang sesuai
 - 2) Program rotasi/pergiliran tanaman yang sesuai
 - 3) Pengelolaan tanah secara mekanik
 - 4) Penggunaan tanaman perangkap
 - 5) Penggunaan pupuk hijau dan sisa potongan tanaman
 - 6) Pengendalian mekanis seperti penggunaan perangkap, penghalang, cahaya dan suara
 - 7) Pelestarian dan pemanfaatan musuh alami (parasit, predator dan pathogen serangga) melalui pelepasan musuh alami dan penyediaan habitat yang cocok seperti : pembuatan pagar hidup dan tempat

berlindung musuh alami, zona penyangga ekologi yang menjaga vegetasi asli untuk mengembangkan populasi musuh alami penyangga ekologi

- 8) Ekosistem yang beragam. Hal ini akan bervariasi antar daerah. Sebagai contoh : zona penyangga untuk mengendalikan erosi, *agroforestry*, merotasikan tanaman dan sebagainya.
- 9) Pengendalian gulma dengan pemanasan (*flame weeding*)
- 10) Pengembalaan ternak (sesuai dengan komoditas)
- 11) Penyiapan biodinamik dari *stone meal*, kotoran ternak atau tanaman
- 12) Penggunaan sterilisasi uap bila rotasi yang sesuai untuk memperbaiki tanah tidak dapat dilakukan

5. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan terhadap penerapan sistem pertanian organik dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Pembinaan dilakukan dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan. Pembinaan sistem pertanian organik dapat melibatkan partisipasi dari pihak lain yang kompeten, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Instansi terkait lingkup pertanian. Pengawasan terhadap produk organik yang beredar, dilakukan oleh Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan mencari jawaban atas suatu masalah secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu sebuah penelitian memerlukan sebuah metode penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti sehingga peneliti dapat memperoleh data-data yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang ada.

Menurut Sugiono (2012, h.2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk itu metode penelitian memiliki peranan dalam sebuah penelitian yaitu untuk mendapatkan data dan informasi yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti oleh karena itu metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah dan kegiatan dan memudahkan dalam pencapaian tujuan jenis-jenis penelitian dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: pertama adalah penelitian eksplanasi yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan dan mengembangkan teori, kedua adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, dan yang ketiga adalah penelitian eksplorasi yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Moleong (2000, h.6) berpendapat penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

Dari berbagai pendapat di atas dapat tarik kesimpulan dengan metode deskriptif mampu menggambarkan Implementasi Kebijakan Pertanian Organik (Studi di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

B. Fokus Penelitian

Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah suatu dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur dan luwes yang mengikuti pola pikir bersifat *imperial inductive*, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya dilapangan (Moleong, 2000, h.62-63). Dengan kejelasan dan kemampuan fokus peneliti dapat membuat keputusan yang tepat data mana yang akan dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu atau harus dibuang dengan fokus penelitian tidak akan terjebak oleh melimpahnya volume data yang melimpah di lapangan

Menurut Moleong (2000, h.62) bahwa ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapai dalam menetapkan fokus pertama penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau memasukkan –

mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan dengan demikian pemikiran di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Kebijakan Pertanian Organik pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, meliputi :
 - a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;
 - b. Sumber-sumber kebijakan;
 - c. Karakteristik badan-badan pelaksana;
 - d. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik;
 - e. Sikap para pelaksana;
 - f. Komunikasi antar organisasi dengan kegiatan-kegiatan pelaksana;
2. Hasil implementasi kebijakan pertanian organik meliputi:
 - a. Antisipasi kerusakan tanah
 - b. Lingkungan hidup
 - c. Kesejahteraan petani

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi atau tempat yang digunakan peneliti untuk menangkap kejadian sebenarnya dari suatu obyek yang akan dilakukan di Kota Batu. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Batu mempunyai Visi Misi yang mengacu pada pertanian organik, karena dilihat dari visi misi seluruh Indonesia, Kota Batu yang merupakan kota pertama mengumumkan visi dan misi tentang Pertanian Organik.

Sedangkan situs penelitian adalah letak atau tempat peneliti mengungkapkan keadaan atau peristiwa sebenarnya dari keadaan yang di teliti. Situs penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, Jl. Diponegoro No. 08, kode pos 65314. Telp. (0341) 511674, Batu, Jawa Timur, Indonesia. Pemilihan situs penelitian didasarkan pada alasan bahwa Dinas

Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yang paling berhubungan dengan kebijakan Pertanian Organik di Kota Batu

D. Sumber Data

Sumber data sangat diperlukan dalam penelitian karena dengan sumber data, peneliti dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Lofland dalam Moleong (2011, h.157) mengemukakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Menurut Sugiyono, sumber data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer yaitu sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan:
 - a) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu: Bapak Yusuf selaku Kepala Bidang Hortikultura
 - b) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu: Ibu Martha selaku Petugas Penyuluh Lapang
 - c) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu: Ibu vertilis Winaras selaku Petugas Penyuluh Lapang
 - d) Tenaga Ahli Pendampingan Kawasan Organik: Prof. Indah selaku akademisi

- e) Tenaga Ahli Pendampingan Kawasan Organik: Bapak Edy selaku Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
 - f) Ketua Gapoktan Mitra Sejati Pandanrejo: Bapak Winardi selaku Petani Organik
 - g) Anggota KWT desa Dadaptulis : Ibu As selaku petani organik
 - h) Ketua Gapoktan Pendem: Bapak Agus Mutholib selaku Petani Konvensional
 - i) Petani anorganik Desa Sumbergondo : Bapak solikin selaku petani anorganik
 - j) Ketua Gapoktan Desa Sumbergondo: Bapak Lestari
- b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen seperti halnya, berupa buku – buku yang relevan, produk hukum, dokumen, atau informasi tertulis, internet yang berkaitan dan menunjang implementasi kebijakan pertanian organik di Kota Batu. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain: profil Kota Batu, profil Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu, Kajian Bappeda, serta dokumen – dokumen pendukung lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2011, h.174) pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut Arikunto (2006), menerangkan teknik pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai cara

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Kualitas data yang diperoleh bergantung pada sejumlah faktor. Keterampilan dan ketekunan peneliti sangat berpengaruh terhadap kesediaan dan keakuratan data yang diperoleh (Widi, 2010, h.236). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Wawancara

Percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan sumber data primer. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan dan untuk melakukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam tentang Implementasi Kebijakan Pertanian Organik di Kota Batu.

2. Observasi

Menurut Sarwono (2006, h.224), kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini pengamatan dilakukan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Dengan cara mencatat hal-hal yang penting dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, mencatat, dan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa arsip-arsip dan catatan-catatan yang menjadi bahan masukan dalam penyusunan penelitian yang dianggap penting dan relevansi dengan masalah yang diteliti. Menurut Sarwono (2006, h.225), merupakan “sarana pembentuk peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis, kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya”. Disini peneliti mengumpulkan data atau informasi dari Dinas Pertanian dan *Stakeholder* yang terlibat Kota Batu.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk membantu mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri

Peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam penelitian karena dapat terjun langsung ke lapangan dan menentukan fokus penelitian. Peneliti dapat mencatat dan mengamati fenomena yang terjadi dilapangan.

2. Pedoman wawancara

Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan alternative jawaban yang akan di tanyakan kepada narasumber guna mendapatkan data primer yang diinginkan peneliti.

3. Catatan lapangan

Catatan lapangan merupakan catatan yang ditulis oleh peneliti dari apa yang telah dilihat, didengar, dialami di lokasi penelitian dalam rangka pengumpulan data.

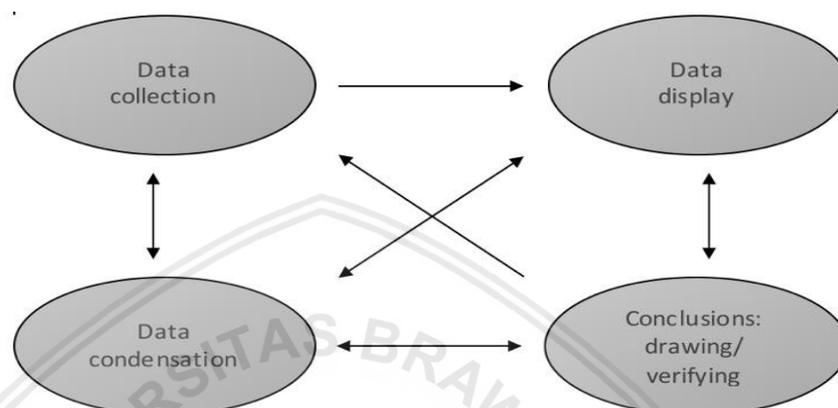
4. Alat dokumentasi

Alat yang digunakan untuk mendokumentasikan dan mencatat untuk mambantu pencatatan hasil yang di peroleh dari penelitian yang sedang diteliti di lapangan.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif. Menurut Azwar (2013, h.126) analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diterima dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Rossman dan Rallis dalam Creswell (2010, h.274), analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan.

Dalam melakukan analisis data kualitatif, menurut Miles, Huberman dan Saldana (2013, h.12) dapat melalui alur kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2013, h.14)

1. *Data collection* (pengumpulan data) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada objek penelitian yang berkaitan erat dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
2. *Data condensation* (kondensasi data) merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapatkan dari lapangan. Kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data dilakukan peneliti dengan cara membuat matriks, data yang diperoleh dilokasi penelitian dituangkan dalam matriks secara lengkap dan terinci. Matriks disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya, hal ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung dan pada tahap

analisa data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. Data *display* (penyajian data), penyajian diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penggunaan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Dalam hal ini peneliti menyajikan data dengan deskripsi pembahasan yang telah disesuaikan pada hasil matriks peneliti.
4. *Conclusion drawing/verifying* (penarikan kesimpulan/verifikasi) yakni untuk menganalisis serta mencari makna (*meaning*) dari data yang ada sehingga dapat ditemukan tema, pola hubungan apapun proposisi-proposisi. Selanjutnya dengan bertambahnya data melalui proses secara terus menerus, akan diperoleh kesimpulan dan dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Pada penarikan kesimpulan peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil matriks yang telah peneliti rinci dari fokus, hasil wawancara, temuan, teori dan pembahasan.

H. Keabsahan Data

Pada setiap penelitian tentunya memiliki kriteria mengenai data-data yang telah diperoleh dapat diuji kebenarannya, dalam penelitian kualitatif hal ini disebut dengan keabsahan data. Menurut Yusuf (2014, h.394) untuk memeriksa

keabsahan data dalam sebuah penelitian dapat melalui uji kredibilitas (*credibility*), untuk menentukan mungkinkah hasil penelitian dapat ditransfer ke wilayah lain, maka perlu melakukan uji transferabilitas (*transferability*), untuk mengetahui reliabilitas dapat dilakukan uji dependabilitas (*dependability*) dan untuk mengetahui apakah hasil penelitian benar dapat pula dikaji ulang kesesuaian antara proses dan hasil melalui uji komformitas (*comformity*). Berikut penjelasan mengenai beberapa uji keabsahan data diatas (Yusuf, 2014, h.394-398) :

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Kebenaran, keakuratan dan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian menentukan keakuratan dan ketepatan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang tepat dan sesuai dengan latar belakang yang sesungguhnya dalam penelitian, maka peneliti melakukan dapat berbagai cara dalam penelitian kualitatif, antara lain:

a. Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan.

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen penelitian yang dilakukan. Keterlibatan dan keikutsertaan peneliti dalam sebuah penelitian menjadi sangat penting, dikarenakan peneliti yang menentukan lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tersebut. Hal ini berarti peneliti harus mengetahui kapan penelitian yang dilakukan harus dihentikan atau memperpanjang waktu penelitian dikarenakan data yang dikumpulkan belum meyakinkan atau dapat dipercaya.

b. Meningkatkan ketekunan dan pengamatan

Situasi sosial di lapangan yang terkadang kurang bersabat, mengharuskan peneliti lebih tekun dalam mengamati masalah yang terjadi, hal ini dikarenakan akan mempengaruhi proses dan aktivitas dalam pengumpulan data. Peneliti tidak boleh cepat percaya dengan apa yang “*tampak atau ditampakkan*”, dikarenakan dibalik hal yang tampak terkadang terdapat kebenaran yang tersembunyi. Oleh karena itu ketelitian dan ketekunan peneliti sangat dibutuhkan pada saat melakukan penelitian, sehingga mendapatkan data yang akurat dan dalam situasi sosial yang sesungguhnya.

c. Melakukan triangulasi (*triangulation*) sesuai aturan.

Triangulasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Dalam triangulasi data menggunakan beberapa sumber dan metode yang berbeda. Hal ini berarti apabila pada tahap awal pengumpulan data menggunakan metode observasi, maka selanjutnya menggunakan metode wawancara.

d. Melakukan cek dengan anggota lain dalam kelompok (*member checks*).

Ketepatan sebuah data yang sudah diperoleh sebelumnya pada saat penelitian dapat diuji kebenarannya kembali melalui anggota lain dari kelompok, dimana data dan informasi dikumpulkan. *Member*

check sendiri dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal secara berkelanjutan.

e. Menganalisis kasus negatif (*negatively case analysis*)

Ketepatan data dan informasi dalam penelitian, dapat dipercaya kebenarannya apabila sudah tidak ditemukan hal yang negatif baik dalam pengumpulan data maupun pada saat penyajian data. Pada hal ini peneliti dituntut untuk mencari, menemukan dan menilai kembali kasus negatif tersebut. Apabila terjadi kekeliruan, maka peneliti harus mengumpulkan kembali dari sumber lainnya, namun masih di dalam ranah/kondisi sosial yang sama. Hal ini dilakukan sampai tidak ditemukan lagi hal yang negatif dalam penelitian tersebut.

f. Menggunakan *reference*/ referensi yang tepat

Kredibilitas data dan informasi yang dikumpulkan dan ditulis pada saat penelitian, akan lebih dipercaya apabila dilengkapi dengan bahan-bahan referensi yang tepat. Referensi yang digunakan haruslah berasal dari seorang yang ahli dalam bidang yang sesuai dengan fokus dan data yang dikumpulkan.

2. Uji dependabilitas/kebergantungan (*dependability*)

Ketepatan hasil penelitian kualitatif ditentukan beberapa faktor yang salah satunya adalah reliabilitas instrumen sebagai alat pengumpul data. Untuk menentukan dependabilitas dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses penelitian yang dilakukan. Hal

ini berarti tahap-tahap yang telah dilakukan pada saat penelitian kualitatif, dikaji ulang kembali dengan langkah-langkah yang sesungguhnya. Untuk mengetahui kebenaran mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan, peneliti harus mampu menunjukkan bukti kerja yang dilakukan sejak menentukan masalah dan fokus penelitian, memasuki lapangan, menentukan informan/sumber data penelitian, melakukan analisis data, menguji keabsahan data dan membuat kesimpulan dari peneliti. Semua hal di atas perlu ditunjukkan, baik berupa catatan, rekaman, foto/gambar dan dokumen lainnya. Setelah melakukan audit proses, maka peneliti harus melakukan audit pada hasil penelitian. Apabila hasil audit proses penelitian dan hasil penelitian sudah benar, maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan sudah tidak diragukan lagi dependabilitasnya.

3. Uji transferabilitas/keteralihan (*transferability*)

Penelitian kualitatif bersifat kontekstual, dan tidak melakukan generalisasi hasil penelitian seperti yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Dalam bahasa penelitian kualitatif menggunakan istilah transferabilitas, yang memiliki makna konsep yang sama dengan validitas eksternal. Hasil penelitian kualitatif di tempat tertentu hanya dapat ditransfer ke daerah lain apabila tempat tersebut memiliki karakter yang benar-benar sama dengan tempat/situasi sosial yang diteliti. Hasil penelitian kualitatif hanya mungkin ditransfer, apabila situasi sosial yang mencakup aktor (*actor*), tempat (*place*) dan aktivitas (*activity*), serta konteksnya sama diantara kedua tempat tersebut.

4. Uji komformitas/ketegasan (*comformity*)

Uji komformitas dilakukan untuk melihat keterkaitan antara hasil uji audit produk (hasil penelitian) dengan hasil uji proses penelitian. Apabila hasil audit produk merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar uji komformitas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Kota Batu

Pada awal keberadaannya Kota Batu masih merupakan kecamatan dalam lingkup wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Batu masih merupakan kecamatan dalam lingkupan wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang. Melihat perkembangan Kota Batu yang semakin baik, pada tahun 1993 Kecamatan Batu berubah status menjadi Kota Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.12 Tahun 1993 tentang pembentukan dan Kota Administratif Batu dalam wilayah Kabupaten Malang, yang meliputi 3 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo.

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Juni 2001, status Kota Batu berubah dari Kota Administratif menjadi daerah otonom Kota Batu. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu secara resmi disahkan sebagai daerah otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang meliputi Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo yang terdiri dari 20 desa dan 4 kelurahan.

Sebagai Daerah otonom yang masih baru, Kota Batu telah memiliki tugas serta tantangan dalam mengembangkan daerahnya terutama di era otonomi daerah.

a. Kondisi Topografi Kota Batu

Kota Batu berada pada ketinggian antara 600 sampai dengan 1.700 m.dpl. Secara topografi Kota Batu terbagi menjadi 3 bagian yaitu dataran tinggi dengan bentuk wilayah datar sampai berombak, berombak sampai berbukit, dan bentuk berbukit sampai bergunung. Keadaan topografi ini menunjukkan di wilayah bagian selatan terutama di Kecamatan Junrejo cenderung agak mendatar, kecuali Desa Pendem dan Desa Dadaprejo yang membentuk lembah pada Sungai Brantas dan anak sungainya. Pada bagian utara yaitu pada daerah hutan lindung dan daerah Cangar, kondisi topografinya relatif terjal karena berada pada kawasan berbukit dan bergunung dengan ketinggian lebih dari 700 mdpl hingga 1.900 mdpl. Kondisi ini memiliki potensi untuk pariwisata dengan pemandangan alam yang sangat indah dan udara yang sejuk.

b. Kemiringan Kota Batu

- Kemiringan 0-8° merupakan kawasan yang layak untuk kegiatan budidaya pertanian hortikultura dan tanaman pangan selain kegiatan pemukiman.
- Kemiringan 8-15° merupakan kawasan yang layak untuk dikembangkan pertanian perkebunan.

- Kemiringan 15-40° sebagian besar merupakan kawasan yang dikembangkan hutan produksi.
- Kemiringan di atas 40° merupakan kawasan lindung mutlak.

c. Jenis Lahan

Berdasarkan letak geografisnya, jenis tanah di Kota Batu dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis. Pertama, jenis tanah Andosol berupa lahan tanah yang paling subur meliputi Kecamatan Batu seluas 1.831,04 ha, Kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 ha. Kedua, jenis tanah Kambisol berupa jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 ha, Kecamatan Junrejo 741,25 ha dan Kecamatan Bumiaji 1395,81 ha. Ketiga, tanah alluvial berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu seluas 239,86 ha, Kecamatan Junrejo 199,93 ha dan Kecamatan Bumiaji 376,48 ha. Terakhir jenis tanah Latosol meliputi Batu seluas 260,34 ha, Kecamatan Junrejo 217,00 ha dan Kecamatan Bumiaji 408,61 ha.

d. Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kota Batu

Pemanfaatan lahan pertanian di Kota Batu menurut jenis pengairannya dikelompokkan menjadi 2 yaitu lahan beririgasi (sawah) dan lahan tidak beririgasi (bukan sawah). Lahan beririgasi atau sawah dibagi menjadi sawah teknis, sawah setengah teknis, sawah sederhana, dan sawah irigasi desa/non PU. Dari tabel di bawah diketahui bahwa di

Kota Batu luas lahan bukan sawah lebih banyak dibandingkan dengan lahan sawah. Lahan beririgasi atau sawah di Kota Batu ada seluas 2.480 ha sedangkan lahan bukan sawah seluas 4.186,72 ha terdiri dari lahan tegal seluas 3.323,57 Ha, lahan pekarangan seluas 860,99 Ha dan lahan kolam seluas 2,16 Ha. Hal ini mengindikasikan pengembangan Kota Batu yang lebih terpusat pada jenis tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran, bunga, dan buah, sesuai dengan kondisi iklim dan topografi kota Batu yang memang lebih cocok untuk itu.

Lahan bagi tanaman hortikultura didominasi oleh tanaman apel yang memberikan kontribusi terbesar dalam luasan lahan tidak beririgasi dibanding tanaman palawija, tanaman biofarmaka, dan tanaman buah lainnya. Bermula dari kecocokan budidaya apel dengan iklim dan lingkungan di Kota Batu sehingga memacu minat petani bertanam apel. Dari situlah Kota Batu menjadi identik sebagai kota penghasil apel.

Tabel 1. Lahan Pertanian dan Hutan Kota Batu Tahun 2015

No	Kecamatan	Sawah (Ha)	Tegal (Ha)	Pekarangan (Ha)	Kolam (Ha)	Hutan Negara (Ha)
1	Batu	668	944,88	374,71	0,70	1.115,9
2	Junrejo	1098	92,30	23,61	0,99	3.256,8
3	Bumiaji	696	2.286,39	462,67	0,47	1.311,1
KOTA BATU		2.462 .	3.323,57	860,99	2,16	11.071,1

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota

Batu

Pada tahun 2015 luas kawasan hutan di Kota Batu sebesar 11.071,1 ha. Menurut fungsinya, kawasan hutan dibagi menjadi hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi dengan pembagian hutan lindung seluas 2969,8 ha; hutan konservasi seluas 4641,2 ha; dan hutan produksi seluas 3460,1 ha. Untuk lebih jelasnya pembagian kawasan hutan di Kota Batu pada tahun 2015 per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Luas Kawasan Hutan Tahun 2015

No	Kecamatan	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Konservasi (Ha)	Hutan Produksi (Ha)
1	Batu	387,20	-	728,60
2	Junrejo	918,20	-	392,90
3	Bumiaji	1.664,40	4.641,20	2.338,60
KOTA BATU		2.969,80 .,	4.641,20 .,	3.460,10 .,

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota

Batu

e. **Visi dan Misi Kota Batu Tahun 2012-2017**

- **Visi Kota Batu**

“ Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata
Internasional “

Ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing ditopang sumberdaya (Alam, Manusia dan Budaya) yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- **Misi Kota Batu**

1. Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama.
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
3. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik.
4. Meningkatkan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan Internasional.
5. Optimalisasi pemerintahan daerah.
6. Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan.
7. Peningkatan kualitas kesehatan.
8. Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas.
9. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
10. Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di kota batu yang harmonis dan demokratis.
11. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM.

2. **Gambaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu**

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang mempunyai peran cukup penting dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat Kota Batu khususnya pada pembangunan sektor pertanian. Sesuai Visi Kota Batu yang berbunyi "Sentra Pariwisata Berbasis Pertanian Didukung oleh Sumberdaya manusia, Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Budaya serta Pemerintah yang Kreatif, Inovatif dan Bersih Bagi Seluruh Rakyat yang dijiwai Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan YME".

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu terdiri dari 4 bidang diantaranya :

1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
2. Bidang Peternakan dan Perikanan.
3. Bidang Teknologi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

a. **Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu**

- **Visi**

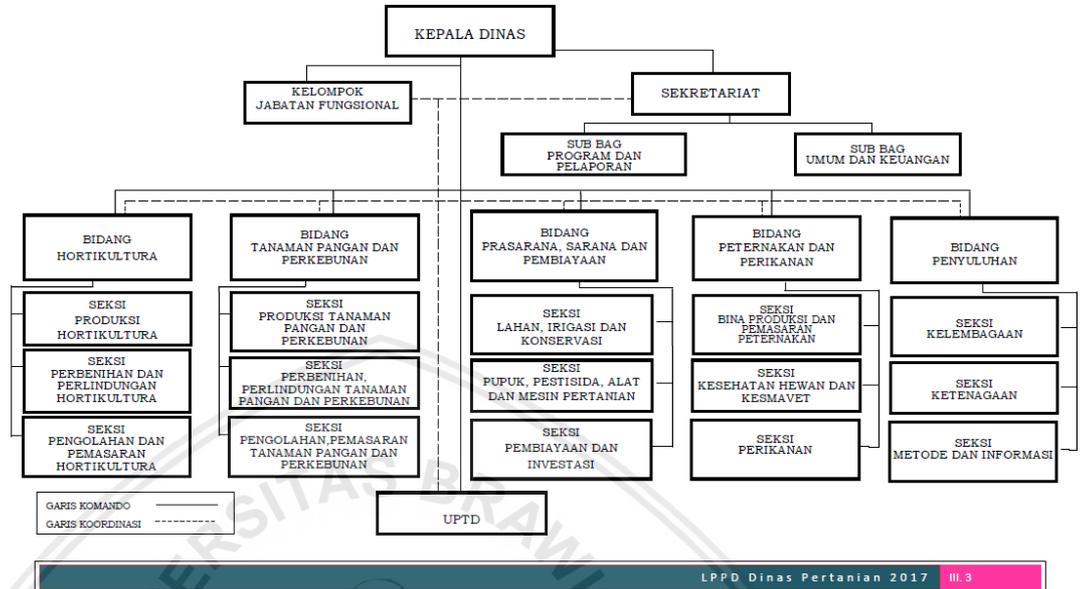
Terwujudnya Sistem Pertanian Berbasis Organik yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan Didukung Hutan yang Lestari.

- **Misi**

1. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik.
2. Meningkatkan SDM Pertanian Kota Batu.
3. Meningkatkan agribisnis dan agroindustri berbasis pertanian domestic pedesaan.
4. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.
5. Meningkatkan promosi dan daya saing produk pertanian lokal.
6. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan/perbenihan, pakan, budidaya, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan.
7. Mempertahankan eksistensi dan fungsi kawasan hutan.
8. Meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Pengusahaan Hutan (PH), serta Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA).

b. Struktur organisasi

Gambar 1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA BATU



Gambar

4. Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Sumber: Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

c. Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

- Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- c. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- f. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusa laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

d. Tujuan Dan Sasaran

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Misi 1 : Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik	
Tujuan	Sasaran
	1. Mewujudkan perubahan pola pikir masyarakat petani dan organisasinya dari pertanian non organik menjadi pertanian organik.
	2. Mewujudkan sistem pertanian organik.

Mewujudkan pertanian organik yang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.	3. Menghasilkan produk pertanian organik yang dapat diterima oleh masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
	4. Mewujudkan pertanian organik yang dapat bersinergi dengan bidang pariwisata.
	5. Memfokuskan aspek penelitian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian organik.
	6. Meningkatkan kesejahteraan petani.
Misi 2 : Meningkatkan SDM Pertanian Kota Batu	
Tujuan	Sasaran
Membentuk Sumber Daya Manusia bidang pertanian yang handal secara teknis berbasis keilmuan.	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian organik melalui peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya.
	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan yang dapat diberikan kepada masyarakat petani.
	3. Memberikan informasi pertanian secara terus menerus kepada semua pelaku agrobisnis dan masyarakat melalui sebuah sistem informasi.
Misi 3 : Meningkatkan Agrobisnis dan Agroindustri Berbasis Pertanian Domestik Pedesaan	
Tujuan	Sasaran
Terwujudnya sistem	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan pedesaan.

<p>pertanian dari hulu sampai hilir yang bersinergi dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.</p>	<p>2. Menjaga kelancaran aktifitas pertanian.</p> <p>3. Memfasilitasi pemasaran hasil-hasil pertanian.</p>
<p>Misi 4 : Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian</p>	
<p>Tujuan</p>	<p>Sasaran</p>
<p>Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang optimal.</p>	<p>1. Meningkatkan produktivitas semua komoditas pertanian secara luas termasuk peternakan dan perikanan.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian organik dengan memaksimalkan penggunaan teknologi yang efektif.</p> <p>3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas proses dan hasil pertanian dari sisi pemanfaatan teknologi pertanian.</p> <p>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka memenuhi permintaan pasar dan ketahanan pangan.</p>
<p>Misi 5 : Meningkatkan Promosi dan Daya Saing Produk Pertanian Lokal</p>	
<p>Tujuan</p>	<p>Sasaran</p>
<p>Terwujudnya jaringan pemasaran yang luas, kontinyu dan berdaya saing.</p>	<p>1. Meningkatkan daya saing produk pertanian terutama organik dalam persaingan pasar lokal, regional, dan nasional.</p> <p>2. Meningkatkan penjualan hasil pertanian terutama organik melalui pasar yang lebih luas</p> <p>3. Menjaga statistik penjualan hasil pertanian terutama organik melalui keluasan pasar yang telah diraih</p>
<p>Misi 6 : Menyelenggarakan dan Menggerakkan Pengembangan</p>	

Perbibitan/Perbenihan, Pakan, Budidaya, Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen Dalam Mencapai Penyediaan dan Keamanan Pangan Hewani Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peternak dan Pembudidaya ikan	
Tujuan	Sasaran
Meraih keunggulan hasil peternakan dan perikanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan.	1. Menghasilkan produk peternakan dan perikanan yang jenis, jumlah dan kualitasnya dibutuhkan oleh masyarakat umum dan industri.
	2. Memenuhi permintaan pasar terhadap daging, telur dan bahan baku ikan dari usaha-usaha makanan berbahan dasar ikan
	3. Meningkatkan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan
	4. Menstabilkan dan meningkatkan usaha bidang peternakan dan perikanan komersial dan usaha produk olahan
Misi 7. Mempertahankan Eksistensi dan Fungsi Kawasan Hutan	
Tujuan	Sasaran
Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara teratur untuk memperoleh manfaat konservasi tanpa menimbulkan kerusakan.	1. Memelihara keunggulan sumber daya alam hutan sebagai hutan resapan air dan keindahan panorama.
	2. Memelihara keunggulan sumber daya mata air.
	3. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
	4. Melindungi lingkungan dari pencemaran dan perusakan.
	5. Mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.
Misi 8. Meningkatkan dan Mengembangkan Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Pengusahaan Hutan (PH), serta Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)	

Tujuan	Sasaran
Perlindungan habitat, flora dan fauna sebagai sumber plasma nutfah serta terciptanya iklim pengusahaan hutan yang bijak dan normatif sesuai dengan kaidah pengelolaan hutan lestari.	1. Menjaga lingkungan terhadap terjadinya bencana sebagai akibat dari perubahan iklim.
	2. Memanfaatkan hasil kekayaan hutan secara terus-menerus dengan tetap menjaga kelestarian hutan.
	3. Memulihkan kualitas lingkungan.

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

3. Program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik

Visi Kota Batu 2012 – 2017 adalah Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional. Ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Misi ke-3 ini dari visi Kota Batu tahun 2012 – 2017 adalah mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik. Tujuan dari misi ini adalah mewujudkan pertanian organik berwawasan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.

Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan rencana pengembang pertanian organik, pihak Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu menerapkan strategi membentuk kawasan pertanian organik yang dirintis pada tahun 2011. Kegiatan dilaksanakan dengan sumber dana APBD II melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan: Kegiatan

Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura Organik. Dalam kegiatan tersebut prioritas kawasan organik yang dibentuk adalah untuk sayuran dan padi. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan berupa fasilitasi sarana produksi yang meliputi bibit, pupuk dan pestisida organik, serta pendampingan petani.

Menurut Fadlina, dkk, 2013. Strategi yang digunakan dalam rencana pengembangan pertanian organik oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu pada intinya adalah memasyarakatkan penerapan cara bertani yang mengarah pada penerapan pertanian organik serta menginisiasi pembentukan kawasan organik sebagai *pilot project*. Pemilihan strategi tersebut mengacu pada tujuan yang ingin dicapai yaitu merubah cara berpikir masyarakat petani di Kota Batu dari pertanian konvensional (anorganik) menuju ke pertanian organik. Dengan memasyarakatkan pertanian organik kepada petani diharapkan secara bertahap dapat membantu mengembalikan kualitas lahan pertanian sehingga mampu memberikan hasil yang lebih baik, meningkatkan nilai jual produk, memberikan hasil yang lebih baik, meningkatkan nilai jual produk, memberikan keuntungan kepada petani karena biaya usaha tani rendah. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai tujuan berikutnya yaitu peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani, serta menarik wisatawan untuk mendukung arah pembangunan Kota Batu sebagai Kota Wisata berbasis pertanian.

Program Batu *Go Organic* sebagai strategi pengembangan pertanian organik di Kota Batu dengan menggunakan konsep kawasan, karena pola pertanian berbasis kawasan berpotensi pada kecukupan pemenuhan permintaan pasar, memudahkan pengawasan dan pengendalian organism pengganggu tanaman (OPT), serta memberikan peluang bagi komoditas potensial di kawasan tersebut untuk ditangani secara proporsional.

Adapun kawasan pertanian organik yang dibentuk di Kota Batu pertama kali pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Kawasan sayur organik Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, seluas 15 ha, dengan komoditas yang dikembangkan antara lain kentang, wortel dan sawi putih.
2. Kawasan sayur organik Desa Sumbereja Kecamatan Batu, luas kawasan 10 ha, dengan komoditas yang dikembangkan seledri, brokoli, cabe dan tomat.
3. Kawasan sayur organik Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo, luas kawasan 10 ha, dengan komoditas bawang merah, kembang kol, bawang daun dan jagung manis.
4. Kawasan padi organik Desa Pendem Kecamatan Junrejo, luas kawasan 10 ha.

Kawasan organik tersebut membutuhkan dukungan berbagai sektor sehingga pada kawasan melalui pengembangan berbagai komponen pendukungnya meliputi sektor perdagangan, industri kecil pengolahan hasil pertanian, serta infrastruktur pendukung. Hal ini membuka pula

peluang kerjasama antar daerah untuk saling mendukung demi memperoleh manfaat sebesar – besarnya dari keberadaan kawasan pertanian organik. Awalnya pelaksanaan agak kesulitan petani petani di ajak untuk meninggalkan pupuk dan pestisida kimia, namun dalam kurun waktu 7 tahun perkembangan selanjutnya jumlah desa pelaksana mencapai 14 desa, yang perlu dievaluasi tingkat keberhasilannya. (Dinas Pertanian Kota Batu 2016).

B. Penyajian Data Fokus

1. Implementasi Kebijakan Pertanian Organik pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Pertanian organik di Kota Batu merupakan salah satu bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012 – 2017 dengan peraturan Walikota Batu Nomor 22 tahun 2014 tentang sistem pertanian organik. Kebijakan pertanian organik tersebut dijadikan suatu program Pengembangan kawasan Pertanian Organik, berlaku dan mulai di implementasikan sejak tahun 2013, program Pengembangan Pertanian Organik dikerjasamakan dengan tenaga ahli pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu nomor 180/157/KEP/422.110/2014. Keputusan Dinas ini menjelaskan mengenai penunjukan tenaga ahli pendampingan kawasan organik kegiatan pengembangan pertanian tanaman pangan/Hortikultura organik program pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Dalam hal ini Dinas

Pertanian dan Kehutanan Kota Batu masih mengupayakan program pengembangan kawasan pertanian organik di beberapa titik kawasan, karena sampai saat ini pengembangan pertanian organik akan semakin diperluas kawasannya.

Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat tentu memiliki tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yusuf selaku Kepala Bidang Hortikultura pada 11 Mei 2018 menjelaskan bahwa:

“tujuan dari salah satu program yaitu; untuk menjawab permasalahan jika menggunakan Kimia terus menerus akan terjadi degradasi lahan. Dari lahan Kota Batu salah satunya Sumber Brantas dekat das sungai brantas, padahal sungai brantas ini digunakan 13 Kota seluruh Jawa Timur jadi harus menjaga kualitasnya masih bagus dan tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia khususnya pestisida kimia dan pupuk kimia sintetis. Disisi lain juga membantu mensukseskan Visi Misi Kota Batu”

Dalam melakukan implementasi kebijakan pertanian organik di Kota Batu dilakukan tahapan sebagai berikut:

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Kota Batu merupakan salah satu Kota yang memiliki keunggulan di sektor pertanian, memiliki potensi dan peluang untuk memaksimalkan wisata agro yang cukup diminati oleh wisatawan, sehingga Pemerintah Kota dan seluruh stakeholder's merealisasikan pembangunan Kota Batu secara terpadu. Karena tingkat keberhasilannya dapat diukur dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada level pelaksana kebijakan.

Setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat tentu memiliki program untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Suatu tujuan dan sasaran dalam setiap program perlu dilaksanakan semaksimal mungkin dalam setiap pelaksanaannya dan di ukur dari ukuran kebijakan publik untuk mencapai tujuan. Hasil wawancara peneliti dengan Pak Yusuf selaku Kepala Bidang Hortikultura pada 11 mei 2018 bahwa:

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Batu Dinas Pertanian dan Kehutanan membuat program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik namun program ini dikaji terlebih dahulu oleh BAPPEDA layak/tidak layaknya program Pengembangan Kawasan, sebelumnya program nasional dari Menteri Pertanian tahun 2010 di anjurkan untuk semua kawasan-kawasan pertanian ada pertanian organik. Mulanya program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik pada tahun 2010-2011 mulai memberikan arahan Pengembangan Pertanian Organik yaitu sosialisasi, pendampingan (UB dan UMM), pelatihan bimtek, dan merintis Pengembangan Kawasan Pertanian Organik. kemudian ditahun 2012 merintis Pengembangan Kawasan Pertanian Organik di 4 titik kawasan dengan minimal luasan 10 hektar yaitu: Sumber Brantas, Tulungrejo, Sumber Rejo Pendem. Lalu vakum, lalu mengevaluasi kembali Pengembangan Kawasan Pertanian Organik tersebut. Hasil dari implementasi itu menyepakati atau menyimpulkan bahwa bisa dikembangkan untuk Pertanian Organik. Pada tahun 2013 mengadakan lagi Pengembangan Kawasan menjadi 6 titik kawasan yaitu: Sumber Brantas, Tulungrejo, Sumber Rejo, Pendem, Torongrejo, Giripurno. Di tahun berikutnya 2016 ada 4 Sertifikasi Organik dan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang sudah mencapai 14 titik kawasan. walaupun selalu bisa mencapai titik kawasan tetapi luasan kawasan belum tercapai.

Tabel 4. Tahap Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu

Tahun	Pangan & Sayuran	Buah – buahan	Manajemen Organisasi
2012-2013	Peningkatan Kualitas unsur agroekosistem	Revitalisasi Lahan	Terbentuknya organisasi pengelola usaha se-kawasan

			(Kelompok Usaha Pertanian Organik)
2014	Optimalisasi input Organik spesifik lokasi	Revitalisasi lahan dan peningkatan kualitas unsur agroekosistem	Konsolidasi pengelolaan usaha se-kawasan
2015	Menumbuhkan keseimbangan agroekosistem kawasan (masa konversi)	Revitalisasi Kebun dan kesehatan agroekosistem (masa konversi)	Kesepakatan aturan Pengelolaan usaha se-kawasan
2016	Penerapan Pertanian Organik memenuhi Skala Ekologis dan Ekonomis	Penerapan Pertanian Organik buah-buahan skala kawasan	Konsolidasi Modal Usaha dan penerapan manajemen produksi yang holistik
2017	Sertifikasi dan Pelabelan Produk	Sertifikasi dan Pelabelan Produk	Pengelolaan Usaha Pertanian Organik se-Wilayah Kota Batu (Lembaga Agribisnis Kota Batu)

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Tabel 5. Capaian Kegiatan Pertanian Organik

Tahun	Lokasi	Luas	Petani
2012	Desa Pendem, Sumber brantas, Torongrejo, Sumberejo	40 Ha	131 orang
2013	Desa Pendem, Sumber brantas, Tulungrejo, Giripurno, Torongrejo, Sumberejo	60 Ha	205 orang
2014	Desa Pendem, Sumber brantas, Tulungrejo, Giripurno, Junrejo, Torongrejo, Sumberejo, dan Kel. Temas	80 Ha	312 orang
2015	Desa Pendem, Sumber brantas, Tulungrejo, Giripurno, Junrejo, Torongrejo, Sumberejo, Kel. Temas dan Dadaprejo	87,5 Ha	337 orang
2016	Desa Pendem, Sumber brantas, Tulungrejo, Giripurno, Junrejo, Torongrejo, Sumberejo, Kel. Temas, Dadaprejo, Beji,	121,835 Ha	299 orang

	Mojorejo, Sisir , Pandanrejo dan Desa Gunungsari		
--	---	--	--

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Sesuai dengan Visi Misi Kota Batu Dinas Pertanian dan Kehutanan turut serta dalam mensukseskan Visi Misi tersebut diukur dan melihat berdasarkan kondisi obyektif daerah saat ini, dan tantangan yang di hadapi, maka visi pembangunan Kota Batu 2012-2017 adalah : **“Kota Batu Sentra Pertanian Organisasi Berbasis Kepariwisata Internasional”** yang didalamnya mengandung makna **Kota Batu Sebagai Sentra Pertanian Organik**. Hal ini tercantum pada Rencana Strategi Kota Batu (RPJMD 2012-2017). Sehingga Dinas Pertanian Kota Batu membuat program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik. Setelah menjadi program lalu dikaji oleh BAPPEDA sudah sesuai standart dan ukuran kebijakan atau belum, karena suatu ukuran – ukuran dasar kebijakan dan tujuan – tujuan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program Pengembangan Kawasan tersebut. Setelah dikaji Dinas Pertanian mulai mensosialisasikan Program Pengembangan Kawasan dimulai 4 titik kawasan seiring berjalannya waktu titik kawasan tersebut diperluas menjadi 16 titik kawasan sampai dengan saat ini. Pemerintah Kota Batu terus berupaya agar program ini terus berjalan, karena untuk mengantisipasi isu kerusakan tanah, lingkungan hidup, disisi lain visi ini berupaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka lapangan pekerjaan melalui dukungan sektor pertanian organik terhadap sektor pariwisata, karena Kota Batu memiliki unggulan disektor pertanian

memiliki potensi dan peluang untuk memaksimalkan wisata agro yang diminati oleh wisatawan.

b. Sumber-sumber kebijakan

Program yang diputuskan pasti ada sasaran yang dituju sehingga dalam suatu program tentunya akan melibatkan tenaga ahli atau pendamping, dan dengan memberikan dukungan-dukungan berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, untuk mensukseskan suatu program bahkan hal-hal yang dibutuhkan petani agar program tersebut tepat sasaran yang dituju sehingga tepat pada waktu keberhasilan yang telah ditentukan.

Dilihat dari dukungan Sumber Daya Manusia, hasil peneliti Pada wawancara tanggal 11 mei 2018 seperti yang sudah saya jelaskan diatas

bahwa Bapak Yusuf selaku Kepala Bidang Hortikultura mengatakan:

selain pendampingan dan pelajaran bimtek banyak hal bantuan pemerintah untuk mendukung program Pengembangan kawasan tersebut, tidak hanya biaya namun juga pelajaran dan pendampingan.

Karena setiap Program juga membutuhkan dukungan kelompok atau stakeholder tertentu untuk mencapai suatu keberhasilan, maka tugas dari setiap kelompok adalah membantu mensukses suatu keberhasilan Program

Pengembangan Kawasan Pertanian Organik tersebut, menurut PPL

(Petugas Penyuluh Lapang) Ibu Martha pada wawancara 25 mei 2018:

Tugas dari ppl adalah agen pembaharu/ agen of change yaitu merubah perilaku petani berupa pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Selain visi misi Kota Batu 'Kota Batu sentra pertanian organisasi berbasis kepariwisataan internasional' saya sebagai petugas ini harus mensukseskan program beliau, otomatis Dinas Pertanian menggalakkan program ini. Tetapi tahun 2007 saya masuk disini sertifikat yang keluar pertama di dadaprejo. Karena sebelum pertanian organik menjadi unggulan pertama, saya sudah

mengajak petani Dadaprejo menggunakan pertanian organik ditahun 2007. Baru tahun 2014 saya dapat program pengembangan kawasan organik sehingga ditahun 2015 ada lagi saya hanya mengajukan 5 hektar untuk dadaprejo. Tahun 2016 mengajukan lagi kurang lebih luas 5 hektar . sehingga ditahun 2017 ada sertifikasi organik saya masukkan data petani organik saya . jadi saya duluan mandiri sehingga pada saat ada program pertanian organik saya ikut program tersebut.

Tugas dari PPL (Petugas Penyuluh Lapang) tidak jauh beda dengan akademisi, seperti hasil wawancara peneliti dengan Prof. Indah pada tanggal 19 mei 2018, yaitu:

Tugas dari akademisi dalam program pengembangan kawasan pertanian organik. Akademisi hanya mendampingi baik teknis maupun untuk pengembangan kelembagaan. Kalo untuk teknis kita Bergeraknya di peningkatan pengetahuan, ketrampilan, ahli teknologi dari lembaga perguruan tinggi ke kawasan pertanian organik termasuk riset jadi kita adakan penelitian-penelitian di beberapa titik kawasan yang ditentukan oleh pemerintah kota batu untuk melihat bagaimana potensinya. Baik potensi wilayah maupun sumber daya manusianya. Kelembagaannya, ekonominya, pemasaran dari produk-produk mereka kemudian kemitraan mereka bahkan sinergi mereka dengan stakeholder-stakeholder yg berkaitan dengan pengembangan kawasan organik. Kalo teknik budidaya kita kembangkan kearah perbaikan produktivitas , kualitas, kemudian kesuburan tanah, keseimbangan agroekosistemnya atau lingkungannya itu ada pendampingan-pendampingan kesana.

Berbeda dengan tugas Bapak Edy selaku Pengendali Organisme

Pengganggu Tumbuhan (POPT) bahwa:

Tugas dari POPT adalah lebih konsentrasi ke hama dan penyakit pada tumbuhan. Selain daripada itu untuk membuat program SDA dan SDM nya juga harus cukup dua dukungan ini sangat penting karena jika SDM tidak kuat SDA juga sulit berkembang khususnya lahan, air . selama ini SDM vreatif. Karena tanpa mempertimbangkan 2 hal tersebut akan sulit berkembang. Dulu ada 10 hektar yang di fasilitasi dinas dari 14 titik kawasan selalu nambah . lalu ada 1 hektar untuk prakteknya supaya ada percepatan ini disebut program percepatan. Karena kepala bidangnya sering berganti sehingga program ini ada yang putus ada yang nyambung. Nah kita dulu sepakati saprodi di pupuk organik

setelah itu petani bisa bikin. Namun sampai skrg juga masih dibantu sehingga tidak adanya konsistenan dan petani selalu nunggu bantuan. Kita dulu sudah mengkhawatirkan itu, memang target sampai dengan 2017 kmren namun sampai sekarang belum keseluruhan. Sehingga yang tidak sebanding yaitu teknologi berkembang kelembagaannya yg kurang, nah ini yg menyulitkan ketika muncul sertifikasi berarti muncul produk yang sudah tersertifikat pasar kami yang susah. Saya berharap organik membantu petani meminimalkan biaya dan menjaga keberlanjutannya usaha petani karena bisa memproduksi kualitas yang lebih bagus juga. Dulu pemerintah mengajak diadakan event setiap panen atau setiap waktu tertentu, namun kenyataannya hanya sementara, menggelar lalu tidak ada sponsor turun lagi.

Berbeda juga tugas dari LeSOS (Lembaga Sertifikasi Organik Soleliman) seperti peneliti wawancara dengan Bapak Purnomo pada tanggal 19 mei 2018 mengatakan bahwa:

LeSOS hanya memberikan lesensi atau sertifikasi saja, leSOS tidak ikut di dalam prosesnya, jadi jika petani sudah siap untuk di sertifikasi dan akan daftar ke leSOS lalu leSOS memverifikasi. Ada 2 yang dilakukan leSOS , pertama melakukan apakah kelompok yang disertifikasi itu siap atau belum di sertifikasi (asmen awal) dan jika asmen awal sudah dilakukan pasti ada rekomendasi-rekomendasi, jika rekomendasi sudah dilakukan baru ada inspeksi. Survey juga bisa dilakukan oleh leSOS, ada dua yaitu asmen bisa dikirim dalam bentuk format bisa juga leSOS datang kesana sudah sesuai standart – standart atau belum atau jika belum maka akan rekomendasi hasil rekomendasi itu akan disampaikan ke petani harus dilengkapi apa saja, nah jika mereka sudah memenuhi semuanya baru ada inspeksi tersebut.

Dilihat dari Sumber Daya finansial untuk mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif supaya bisa mencapai suatu keberhasilan tersebut, hasil wawancara peneliti dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Ibu Martha pada tanggal 25 mei 2018 bahwa:

selain daripada pendampingan dan sosialisasi ada bibit, pupuk, agen hayati, pestisida nabati, sampai dengan alat pembuat pupuk, alat pembuat peslab diberi, alat destilator diberi, dan lab agen pembuat hayati. Sebenarnya pemerintah membantu stimulus,

kenyataannya petani susah jika tidak dibantu. Untuk tahun ini pemerintah masih membantu sampai dengan setelah sertifikasi, Namun saya juga berharap pemerintah lebih proporsional. Selain dari itu penyuluh juga harus mempunyai ide-ide untuk membantu petani dalam pemasaran hasil panennya.

Hal serupa dikemukakan oleh Bapak Edy selaku Pengendali Organisme

Pengganggu Tumbuhan (POPT) pada wawancara pada tanggal 21 mei 2018

bahwa :

Saya berharap organik membantu petani meminimalkan biaya dan menjaga keberlanjutannya usaha petani karena bisa memproduksi kualitas yang lebih bagus juga. Dulu pemerintah mengajak diadakan event setiap panen atau setiap waktu tertentu, namun kenyataannya hanya sementara, menggelar lalu tidak ada sponsor turun lagi. Selain bantuan dari pemerintah yang disebutkan di atas pemasaran hasil panen dibantu pemerintah awal mulai program ada rancangan besar kerjasama dengan perbankan, jadi pemerintah membentuk jaringan namun pemerintah juga harus mempunyai data, karena kalo sudah kemitra ditarget dan ada perjanjian setiap bulan dan itu harus di breakdown kepetanian untuk menanam sesuai dengan target tersebut, namun ini hanya rancangan program sampai sekarang belum bisa jalan karena rancangan ini juga membutuhkan wilayah yang lebih luas karena kelompok petani organi yang sudah sertifikasipun tidak ada 1 hektar jadi sangat minim memungkinkannya.

Menurut Ibu Vertilis Winaras selaku PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) pada wawancara tanggal 21 mei 2018 :

Pemerintah juga membantu dalam pemasaran salah satu bentuknya yaitu pertama mengeluarkan edaran, SEKDA membuat edaran untuk membeli produk organik. Realisasinya, Pemerintah membantu regulasinya namun realisasinya nol; yang kedua apakah pemerintah membantu di dalam pemasaran, iya membantu. Dinas Pertanian membuat asosiasi untuk asosiasi petani yang memang menampung semua kegiatan semua product pertanian organik tapi hanya membentuk asosiasi, memang dibentuk asosiasinya tetapi realisasinya tidak jalan, tidak di ambil dari petaninya. Ini sebuah kebijakan tidak masalah, karena kebijakan bukan berarti tepat dibawah. Yang ketiga, dari Dinas tim organik hanya ada 3 orang yang dibawah Dinas. BAPPEDA membantu dalam bentuk stan kecil, isi stan tersebut dibantu oleh Dinas Pertanian contoh rak, yang menjalankan tim kecil kami yang 3 orang tersebut. Langkah kecil yang dibuat yang nyata kita mengambil hasil organik dan kita jual ke ASN yang ada di Kota Batu.

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu mengupayakan yang terbaik untuk petani, sesuai dengan standart program Dinas Pertanian membantu memberikan dari sosialisasi, pelatihan, bimtek sampai dengan pembuatan kompos sendiri dibantu dengan pupuk dan alat – alat pembuat pupuk. Hal ini di ungkapkan dari hasil wawancara peneliti dengan stakeholder yang terlibat dalam Program Pengembangan Pertanian Organik yang sudah peneliti jabarkan di atas. Secara sumber daya sudah terpenuhi dari sumber daya manusia, sumber daya materi, dan sumber daya metode. Program yang dijalankan akan membutuhkan dukungan – dukungan baik SDM, maupun SDA dan lain sebagainya. Pemerintah berharap dengan adanya bantuan ini petani menjadi tetap berkonsekuensi pada kebijakan Pertanian Organik sehingga menarik petani – petani lain menjadi petani organik.

c. Karakteristik badan-badan pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi ciri yang tepat serta cocok dengan badan – badan pelaksana. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Sturktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik – karakteristik, norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi berulang – ulang dalam badan – badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan komponen dari model ini terdiri dari ciri – ciri struktur formal

dari organisasi – organisasi dan atribut – atribut yang tidak formal dari personil mereka. Struktur organisasi dalam pertanian organik terdiri dari beberapa Pemerintah Kota Batu seperti gambar di bawah ini:

Tabel 6. Rekomendasi Kerjasama Stakeholder

No	Stakeholder	Rincian	Peran
1	Pemerintah Daerah dan SKPD terkait	Walikota Batu	Menetapkan kebijakan pendukung perencanaan pengembangan pertanian organik (perda), meliputi SK Tim Teknis, SK Kawasan sert kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan Mendorong komitmen pelaksanaan kegiatan
		Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu	Inisiator dalam pengembangan pertanian menuju organik Memfasilitasi sarana produksi pertanian organik Pendampingan dan transfer teknologi pertanian organik

		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Membantu merintis jaringan pemasaran - Pelatihan kewirausahaan
		Dinas Kesehatan, Kantor Ketahanan Pangan	Melakukan sosialisasi kesehatan masyarakat, terutama mengenai pangan yang aman dan sehat serta bahaya residu pestisida kimia
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan penyebaran konsep teknologi pertanian organik secara formal dalam materi kurikulum pendidikan dasar dan menengah - Pendidikan wirausaha pertanian
		Dinas Cipta Karya, Dinas Pengairan & Bina Marga	Perbaikan infrastruktur umum (jalan, fasilitas umum)
		Aparat desa dan kecamatan. Dan	- Membantu koordinasi program kegiatan dari

		juga	SKPD dengan masyarakat - Memberi motivasi dengan terlibat aktif dalam kegiatan bersama masyarakat
2	Akademisi dan Lembaga Penelitian (Swasta/ Pemerintah/ Yayasan)	Fakultas Pertanian Universitas Barawijaya, Fakultas Pertanian UMM atau perwakilan akademisi lainnya; BPTP, UPT Proteksi Propinsi dan PPAH	- Sebagai konsultan ahli yang bertugas memberikan saran-saran akademis terkait permasalahan teknis yang ditemui di lapangan - Memberikan paket-paket teknologi - Melakukan penelitian teknologi organik - Penyusunan SOP Organik - Penelitian dan penyedia agen hayati
3	masyarakat	Petani, anggota kelompok tani Ketua kelompok tani, ketua gapoktan, pemuka masyarakat	Pelaksana aplikasi teknologi pertanian organik di lapangan Mendorong keaktifan anggota kelompok tani dan memupuk semangat petani
4	Lainnya	- DPRD	- Berkoordinasi dengan

		- LSM organik / peduli lingkungan - Hotel dan Restoran	pemerintah dan LSM dalam menentukan kebijakan yang diperlukan untuk memperlancar pengembangan pertanian organik Berkoordinasi dengan pemerintah dan DPRD dalam menentukan kebijakan yang diperlukan untuk memperlancar pengembangan pertanian organik Pendampingan petani Pengawasan kegiatan oleh masyarakat dan masyarakat Kerjasama untuk penggunaan produk organik (kebijakan prosentase minimal)
--	--	---	---

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik jika dikerjasamakan atau dibentuk suatu struktur organisasi untuk menjalankan suatu program

bersama – sama maka akan mencapai titik keberhasilan Program pengembangan kawasan pertanian organik tersebut. Suatu implementasi dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi juga akan melibatkan masyarakat, karena masyarakat yang akan menjadi sasaran dari implementasi program atau kegiatan dari Pengembangan Kawasan.

d. Kondisi – kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadikan sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, oleh sebab itu agar mencapai suatu keberhasilan maka upaya implementasi kebijakan kondisi eksternal yang kondusif. Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Yusuf selaku Kepala Bidang Hortikultura bahwa :

dilihat dari dampak perubahan kondisi ekonomi khususnya petani yang mempunyai lahan setengah hektar atau lebih pendapatan petani meningkat, Biaya produksi bisa ditekan harga jual panen bisa 3x lipat dari sayuran atau produksi konvensional jadi untuk pendapatan petani ekonominya meningkat. Lalu untuk perubahan sosial itu Dinas secara kultur atau kebiasaan petani ada perubahan juga terutama dari kebiasaan budidayanya budaya konvensional atau organi. Kemudian petani juga lebih melek terhadap pemasaran, dulu konvensional pada saat di lahan namun dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik ini petani bisa menjual langsung ke konsumen jadi harga dimainkan oleh tengkulak karena mereka punya pasar. Dalam perubahan politik tidak ada.

Menurut Bapak Edy selaku Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) bahwa :

Pengaruh pada perubahan terutama pada kebijakan politik sangat besar. Politik itu perbiakan aja kepetani, dan itu harus realistis diterapkan tetapi kalo itu hanya kebijakan sebelum kampanye saja susah. Kalo program dan janji Bapak Walikota Edy Rumpoko ke program ini memang betul difasilitasi juga. Karena Batu wilayah petaninya sempit jika bertarung pasar dengan kualitas yang sama

akan kalah karena jumlahnya sedikit dan daya tawarnya rendah. Sehingga Kota Batu harus membuat produk yang berbeda salah satu pilihannya Pertanian Organik, daya tawarnya naik walaupun luasannya kalah tetapi dari segi mutu petani punya daya tawar. Secara tidak langsung dampak ke ekonomi harga produk tingkat petani akan naik karena pangsa pasar bidikannya jelas, pangsa pasar yang kelas menengah ke atas sehingga petani dapat margin laba lebih tinggi. Dengan lahan yang sempit, kualitas yang baik itu cukup mensejahterakan petani. Kemudian Kota Batu sebagai Kota wisata, kami bidik saja orang yang datang jadi kita memanfaatkan orang yang datang sebagai pasar kami, harusnya petani senang asetnya dikelola dengan baik sampai dibantu pengendalian hama.

Berbeda dengan pendapat dari Ibu Vertilis selaku PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) pada wawancara tanggal 21 Mei 2018 mengatakan bahwa:

Orang melihat dari dampak segi pendapatan selama pasar terbuka pasti tingkat ekonomi meningkat. Hukum pasar berlaku disaat barang tersedia banyak, harga pasti turun. Sekarang orang berorganik sedikit barang tersedia sedikit, harga otomatis naik. Katakanlah petani dibantu oleh pemerintah 1-3 tahun saprodinya, berarti input yang dimasukkan biaya ongkos yang dimasukkan sangat sedikit sementara biaya panen menurun.

Setiap perubahan kondisi pasti akan membuat lingkungan berubah juga dari kondisi ekonomi, petani secara tidak kasat mata akan mengalami perubahan kondisi ekonominya, karena program pertanian organik tersebut selain mendapat pupuk maupun saprodi dari Pemerintah, pupuk yang digunakan juga dari alam sehingga petani bisa buat pupuk sendiri. Dan dari kondisi sosial dan politik program yang di implementasikan dasarnya visi misi Kota Batu sehingga Pemerintah Kota Batu mendukung baik dari segi SDM maupun sumber daya *incentive* untuk membantu para pelaksana kebijakan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat petani.

e. Sikap para Pelaksana

Dalam pelaksanaan program perlu pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan, arah respon pelaksana menerima atau menolak, dan intensitas terhadap kebijakan. Namun setiap program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik yang di keluarkan Pemerintah tidak bisa diterima oleh banyak petani, ada beberapa menolak dan ada juga beberapa yang menerima walaupun tidak banyak. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak winardi selaku petani organik dan ketua gapoktan desa Pandanrejo mengatakan bahwa:

Kenapa saya tertarik organik pertama, karena posisi saya sebagai petani ingin produk saya supaya sehat, kedepannya kesuburan tanahnya kembali lagi. Disisi lain bagi orang yang tanahnya sempit atau tanahnya 500 meter bahkan tanah mereka sewa, akan berpikir jadi petani harus untung jika tidak untung/rugi tidak kembali modal maka mereka akan bangkrut. Kalo saya memang saya coba Tanami kayu selama 7 tahun itu baik, tidak masalah. Petani di Batu ribuan kelompok itu ratusan yang berbadan hukum. Anggap kita mengambil 24 desa / 24 titik desa terlepas 1 desa ada 6/10 petani atau paling banyak 20 petani. Kalo di hitung satu banding berapa. Contoh dikelompok saya anggap 30 orang petani pengikutnya hanya 2 orang yang 28 saya tidak bisa maksa mungkin di desa lain sama, makanya kita mengambil ini dengan memberikan percontohan. Petani itu menerima bantuan seneng tetapi untuk melaksanakan itu tidak sesuai dengan kesepakatan. Lalu di terima pupuk organik petani seneng, tetapi pada saat di Tanya pertanian organik itu sampai dimana? Nah itu yang perlu dipertanggung jawabkan.

Langkah awal menjadi kalo saya tidak membayangkan bagaimana cara pemasarannya, saya menerapkan organik supaya lahan itu bisa kembali baik seperti jaman nenek moyang, kesuburan, kekebalan hama penyakit atau jumlah hama penyakit berkurang, baru memikirkan bagaimana caranya supaya lolos melalui sertifikasi LeSOS, kemudian pemasaran ini tidak saya bahas setiap kali pertemuan dengan Dinas Pertanian tetapi saya dulu bagaimana bisa

atau tidak memasarkannya. Awalnya saya coba dulu tidak menggantungkin Dinas, karna saya yakinpun Dinas kesulitan karena tidak mudah menemukan yang namanya konsumen. sudah saya sampaikan hal ini, ya memang Dinas akan mencari solusi. Di Batu ini harusnya ada suatu tempat yang khusus menerima pemasaran hasil organik terlepas itu sedikit atau banyak. Katakanlah jambu 5 kwintal jambu itu panennya seperti serentak tiba – tiba ada yang bantu tetapi hanya 2-5kg dalam seminggu sekali ya buahnya busuk. Makanya kemarin saya biarkan busuk tidak apa – apa . Dinas memang sudah membantu tetapi membantunya masih dibawah kebutuhan petani sebagai organik untuk memasarkan memang harganya memadahi. Contoh harga Rp 10.000,- dipasaran Rp 2.000,- – Rp 3.000,- tetapi 3-4 kwintal yang lain ya busuk akhirnya saya akal saya jual seperti konvensional. Di sisi lain teman – teman pasti tanya cara pemasaran, saya ya menunjukkan seperti ini. Nah, orang akan tertarik dimana?

Hal ini bisa juga dikatakan arah kecenderungan yang positif dan negatif walaupun yang positif hanya sedikit namun untuk awal program bisa dikatakan berhasil dan perlu adanya solusi – solusi untuk masalah yang membuat petani mundur. Karena penyebab beberapa petani bimbang dan tidak melanjutkan program pertanian organik karena menurut petani pasar belum jelas, sehingga hasil panen dipasarkan ke pasar tradisional sama seperti hasil panen petani konvensional.

f. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan – kegiatan Pelaksana

Setiap program untuk mencapai keberhasilan dalam mengimplementasi suatu kebijakan maka harus ada komunikasi antar organisasi dan kegiatan – kegiatan pelaksana supaya kebijakan apa dan program seperti apa yang akan dilaksanakan bisa sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Seperti pada program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik, hal tersebut harus adanya suatu komunikasi dari

pemerintah ke petani melalui stakeholder – stakeholder yang sudah dikerjasamakan. Seperti pada hasil wawancara peneliti dengan beberapa stakeholder yang terlibat dalam program Pengembangan Kawasan yang sudah dijelaskan diatas bahwa penyampaian program Pemerintah ke petani melalui PPL, POPT, dan akademisi dengan cara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknologi, sampai dengan pembuatan pupuk kompos sendiri. Pendapat tersebut sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran – ukuran dan tujuan – tujuan dipahami oleh individu – individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan.



Gambar 5. Sosialisasi pertanian Organik

2. Hasil implementasi kebijakan pertanian organik meliputi:

Dari program kebijakan maka ada hasil langsung dan jangka panjang baik dampak, manfaat, maupun perubahan pada program kebijakan pertanian organik dalam sasaran yang dituju sampai dengan saat ini yaitu mendapat sertifikasi pertanian organik. Menurut Bapak Yusuf selaku kepala bidang hortikultura berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 11 mei 2018 di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu:

Program pengembangan kawasan pertanian organik sudah mensertifikasi semua titik kawasan yaitu 14 kawasan. dan hal ini akan terus dikembangkan / diperluas seluruh kawasan pertanian organik di Kota Batu. Memang masih ada petani 1 atau 2 petani yang kembali ke konvensional, namun kami akan terus memberikan sosialisasi, pendampingan, pelatihan, dan apa yang di perlukan petani. sehingga ke depannya petani di Kota Batu bisa mandiri, dan dirasa Dinas pertanian cukup membantu dalam kebutuhan pertanian organik.

Pertanian organik di Kota Batu memang sudah lama diterapkan. Namun tidak banyak petani di Kota Batu menerapkan pertanian organik, kebanyakan mereka bertani konvensional/ semi organik. Sehingga setelah pertanian organik masuk ke dalam Visi Misi Kota Batu dan kemudian dijadikan program Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai keberhasilan tersebut. Dan hasil yang sudah dicapai yaitu tersertifikasinya kawasan pertanian organik. Dengan tersertifikasinya kawasan pertanian organik Dinas berharap membantu dalam pemasaran hasil panen para petani, sehingga dampak dan manfaat program pengembangan kawasan pertanian organik nyata dan dirasa cukup berhasil bagi Dinas Pertanian Kota Batu. Kenyataan dilapangan tidak selalu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan,

banyak petani yang kembali ke konvensional sehingga Dinas Pertanian dan Kehutanan perlu mengevaluasi kembali program pengembangan kawasan tersebut. Hasil evaluasi dari program adalah sebagai berikut:

a. Antisipasi kerusakan tanah

Dalam pertanian organik penting bagi para petani untuk menjaga kesuburan tanah, baik dari awal memulai pertanian organik maupun sampai dengan masa pertanian organik sehari – hari, karena tanah yang subur dan sehat juga sangat mempengaruhi bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ke depannya. Menjaga kesuburan tanah tidaklah mudah perlu diperhatikan dari masa kemasa, seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Winardi selaku petani organik:

Karena tidak pernah memakai pupuk sama sekali karena itu kayu. Sekarangpun masih ada kayunya itu saya tumpang sarikan, skrg ada kayu suren bawahnya jambu, jeruk, ada lagi jahe lalu jahe panen saya Tanami cabe kecil.

Pertanian organik hanya perlu memanfaatkan tumbuhan ada, hal tersebut juga masih menguntungkan bagi petani organik. Sehingga biaya pengeluaran yang dipergunakanpun juga sangat minim, oleh sebab itu, bagi para petani yang memulai pertanian organik dari awal perlu masa konversi dan harus diperhatikan lebih, seperti hasil wawancara peneliti dengan Ibu As selaku Petani Organik:

Konversi lahan, masa konversi bisa sampai dengan 6 bulan – 1,5 tahun hanya pemulihan lahan saja tanpa memberi pestisida kimia. Baru masa konversi sudah habis masuk organik murni.

Masa konversi pada tanah untuk pindah ke organik memang membutuhkan waktu yang cukup lama, hal tersebut juga tidak merugikan bagi para petani. Karena kesuburan pada tanah juga bisa mensejahterakan di masa yang akan datang, bahkan ramah lingkungan sehingga di support oleh pemerintah setempat seperti hasil wawancara peneliti dengan Prof. Indah selaku akademisi:

teknik budidaya kita kembangkan kearah perbaikan produktivitas , kualitas, kemudian kesuburan tanahnya , keseimbangan agroekosistemnya atau lingkungannya itu ada pendampingan – pendamping kesana.

Bagi para petani untuk menjaga kesuburan tanah untuk di masa yang akan datang bukan hanya mencukupi kebutuhan atau ekonomi saat ini saja. Dalam program pengembangan kawasan pertanian organik tersebut di bantu akademisi maupun stakeholder lainnya dalam pelatihan mulai kesuburan tanah sampai dengan pembasmi hama. Petani hanya perlu mengimplementasi kebijakan pertanian organik tersebut untuk kesejahteraan di masa depan walaupun dalam masa konversi lahan membutuhkan beberapa waktu, karena pemerintah sudah membantu mulai dari fasilitas baik alat, benih sampai dengan pelatihan. Namun masih ada beberapa petani juga masih menggunakan bahan kimia, seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Solikin selaku petani semi organik:

Nah dengan pupuk organik, jadi bawahnya saya kasih pupuk kandang agar tanahnya subur dan tidak banyak tercemari dengan bahan kimia, dan atasnya di kompres menggunakan bahan kimia supaya tidak mudah terserang penyakit dan hasil panen apel lebih bagus dari segi bentuk maupun warnanya.

Sedikit banyaknya bahan kimia yang sudah diaplikasikan kedalam tumbuhan tetap saja akan mencemari lingkungan salah satunya kesehatan. Namun menurut Bapak Solikin hal tersebut tentu saja akan menguntungkan ekonominya. Penyemprotan dan pengaplikasian dari bahan – bahan kimia pertanian selalu berdampingan dengan masalah pencemaran lingkungan sejak bahan – bahan kimia tersebut dipergunakan di lingkungan. Sebagian besar bahan – bahan kimia pertanian yang di semprotkan jatuh ketanah dan didekomposisi oleh mikroorganisme. Sebagian menguap dan menyebar di atmosfer dimana akan diuraikan oleh sinar ultraviolet atau diserap hujan dan jatuh ke tanah (Uehara, 1993). Dalam rencana kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Sehingga melakukan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai berikut:

- a. Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah/Pembuatan Dam Penahan
- b. Pembuatan Bangunan Dam Pengendali
- c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam RHL
- d. Pembuatan Bibit/Benih Kehutanan
- e. Penyempurnaan Teras dan Saluran Pembuangan Air
- f. Pembuatan Bangunan Sumur Resapan
- g. Pengembangan Agroforestry

b. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, Aspek keberlanjutan sistem produksi merupakan salah satu ciri pertanian ramah lingkungan. Sehingga para petani berperan penting dalam mengelola lingkungan hidup dengan bahan – bahan organik supaya lingkungan terjaga baik petani dan lingkungan sekitar terhindar dari bahan – bahan kimia yang mengakibatkan penyakit. Oleh sebab itu, petani juga berperan penting dalam lingkungan hidup, seperti hasil wawancara peneliti dengan ibu

As selaku petani organik:

menurut saya masalah kesehatan itu yang terpenting, yang kedua dengan adanya pertanian organik kita dituntut menggunakan bahan – bahan organik lokal dan yang tidak bergantung dengan pupuk kimia pabrik apalagi semakin hari semakin meningkat harganya.

Pertanian organik adalah pertanian yang menggunakan bahan – bahan organik seperti pupuk kandang, limbah – limbah rumah tangga, dll sehingga akan menguarangi biaya pupuk selain itu pertanian organik juga meningkatkan kesuburan tanah dan petani maupun konsumenpun juga sehat. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Winardi selaku petani organik:

Kenapa saya tertarik organik pertama, karena posisi saya sebagai petani ingin produk saya supaya sehat, kedepannya kesuburan tanahnya kembali lagi.

Sebagian dari petani sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pertanian organik, namun masih banyak juga petani yang masih

menggunakan pupuk kimia untuk menyeimbangkan pendapatannya, karena menurutnya pertanian organik membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga akan merugikan baginya seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Solikin selaku petani semi organik:

Walaupun dalam gapoktan gembor gembor banyak keuntungannya mendapatkan bibit, alat, hasil panen lebih sehat, ramah lingkungan, bahkan mendapat bantuan sertifikasi organik saya tetap akan menggunakan pupuk yang saya terapkan selama ini. Karena petani organik membutuhkan waktu atau proses yang panjang, namun hasil yang petani dapatkan dalam bertani organik itu berbeda dengan hasil pertanian anorganik, beberapa contohnya adalah bentuk dari buah yang dipanen dan warnanya kurang menarik, berbeda dengan anorganik yang banyak petani juga yang mengakui jika hasil pertanian organik lebih menarik, dan penjualan lebih mudah.

Kebijakan pertanian organik di Kota Batu belum 100% di implementasikan oleh petani di Kota Batu. Masih banyak yang menggunakan semi organik. Program inipun juga masih dikembangkan di beberapa titik kawasan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Sehingga dalam tahap ini tujuan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu masih sampai dengan tersertifikasinya pertanian organik di 14 titik kawasan.

Dalam laporan akhir dari kebijakan pertanian organik ini pun sampai dengan Evaluasi Program Pertanian Organik dimana tujuannya menurut Arifin (2010) dalam laporan akhir evaluasi program pertanian organik terdapat 7 tujuan evaluasi program yaitu untuk menilai proses pelaksanaan program, untuk menilai hasil yang dicapai, untuk

menilai kurikulum dan pembelajaran, untuk membuat kebijakan dan keputusan, untuk memberikan kepercayaan, untuk memonitor pengeluaran dana, serta untuk memperbaiki materi dan kinerja.

Menurut evaluasi program pertanian organik Kota Batu hasil pembinaan oleh Dinas Pertanian dengan sosialisasi yang terus menerus di beberapa desa dan kecamatan tentang rencana program pertanian organik pada kelompok tani. Tani/gapoktan sejak tahun 2010 – 2017 berjalan cukup baik namun hasilnya belum optimal baik jumlah peserta maupun pencapaian target areal.

c. Kesejahteraan petani

Implementasi kebijakan pertanian organik salah satu dari tujuannya adalah untuk kesejahteraan petani bisa diukur dari tingkat seberapa untung pendapatan petani yang di peroleh. Sehingga petani harus meminimalisir pengeluaran untuk kebun atau sawahnya supaya penyakit/hamapun teratasi. Dinas Kota Batu membuat program kebijakan pertanian organik untuk mengantisipasi kerusakan tanah kedepannya, lingkungan terjaga dan tidak tercemari oleh udara yang sudah terkontaminasi dengan pupuk kimia, disisi lain untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Batu membantu dalam pembibitan , pupuk, dan alat – alat yang dibutuhkan, sampai dengan di datangkan ahli Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terkendali sehingga diberikan pelatihan – pelatihan dalam pertanian organik sampai dengan penanggulangan hama, seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yusuf selaku Kepala Bidang Hortikultura:

Pemerintah mengenalkan pertanian organik melalui Petugas Penyuluh Lapang (PPL) dengan melakukan sosialisasi bantuan pelatihan, dan menstimulus bibit perkapodi. Tahun pertama stimulus bibit mencapai 60% tahun ke dua mencapai 70%, tahun ke tiga dilepas menjadi mandiri.

Pemerintah mengupayakan kebijakan pertanian organik supaya berjalan dengan lancar karena tujuan dari dari program ini adalah tersertifikasinya lahan pertanian organik di beberapa titik kawasan disisi lain untuk kesejahteraan masyarakat tani. Dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yaitu, kegiatan pokok yang meliputi: Sekolah Lapang Pengendalian OPT, Peningkatan SDM Pertanian, Penyusunan program penyuluhan pertanian Tk. Desa/ Kelurahan, Kecamatan, dan Kota. Sampai dengan produksi pertanian/ perkebunan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Produksi Pertanian/Perkebunan
- b. SLPHT Tanaman Hortikultura
- c. Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri

Hasil Tembakau dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

HASIL YANG DICAPAI :

- o **Produksi dan Produktifitas Pertanian Meningkat**
- o **Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dapat terkendali**
- o **Ekosistem dan Ekelogi terjaga**
- o **Mutu, harga terjaga dan berdaya saing**
- o **Keindahan alam terjaga sehingga pariwisata meningkat**



Gambar 6. Hasil capaian program pengembangan kawasan pertanian organik

sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

C. Analisi Data fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pertanian Organik pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Kebijakan Pertanian organik di Kota Batu merupakan salah satu bagian dari RPJMD 2012 – 2017 Kota Batu. Dalam melaksanakan fungsinya mengutamakan kearifan lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki, meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya dituntut adanya inovasi, kreatifitas, spirit entrepreneur serta lebih responsive terhadap kepentingan publik. Dengan demikian jarak antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat yang memungkinkan kinerja pelayanan kepada masyarakat

(*public service*) menjadi lebih baik. Perkembangan pembangunan Kota Batu sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Seiring dengan dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang diperlukan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan sehingga tujuan dan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu dapat tercapai. Hal tersebut sesuai dengan teori Harbani Pasolong (2007:8) bahwa administrasi publik ialah tugas – tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Di Kota Batu kebijakan pertanian organik mulai di implementasikan pada tahun 2013 dan di kerjasamakan pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu nomor 180/157/KEP/422.110/2014 tentang menjelaskan mengenai penunjukan tenaga ahli pendampingan kawasan organik kegiatan pengembangan pertanian tanaman pangan/Hortikultura organik program pengembangan pertanian organik di Kota Batu seperti yang sudah peneliti jelaskan pada hal 97.

Suatu kebijakan publik tentu mempunyai suatu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (2008:66) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: *Those action public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives or set forth in prior policy decisions*". Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah, individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang mengarah pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan atau ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti tujuan pertanian organik ini selain tercapainya visi misi “Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional ditunjang oleh Pendidikan yang Tepat Guna dan Berdaya Saing, Ditopang oleh Sumber Daya (Alam, Manusia, dan Budaya) yang Tangguh, Diselenggarakan oleh Pemerintah yang Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai oleh Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Proses implementasi kebijakan publik tidak lepas dari peran seorang aktor didalamnya, peran tersebut sangat mempengaruhi dari sebuah kebijakan yang telah ditentukan, namun keberadaan seorang aktor dalam implementasi kebijakan publik juga sama pentingnya dengan menentukan sebuah kebijakan didalam melakukan pengimplementasian kebijakan publik. Aktor implementasi kebijakan pertanian organik di Kota Batu yang terlibat berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti yaitu: Dinas pertanian dan Kehutanan Kota Batu, Petugas Penyuluh Lapang, Akademisi, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman, dimana aktor tersebut membantu pelaksanaan program Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu dengan tujuan yang sama. Masing – masing aktor tersebut mempunyai peran masing – masing yakni, Dinas Pertanian dan Kehutanan pembuat program, Petugas Penyuluh Lapang sebagai penyuluh memberikan

sosialisasi dan pelatihan, peran akademisi adalah mendampingi, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah yang memberikan pelatihan. Hal ini sejalan dengan dengan teori yang dikemukakan oleh Anderson dalam Tachjan (2006:19) bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Berjalannya proses implementasi kebijakan pertanian organik di Kota Batu akan tercapai apabila kerjasama antara para aktor dan pengimplementasi kebijakan seimbang, dalam artian menuju tujuan yang sama dan tentu dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Proses implementasi kebijakan pertanian organik di Kota Batu berdasarkan RPJMD 2012 – 2017 ada enam variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yakni, ukuran – ukuran dan tujuan – tujuan kebijakan, sumber – sumber kebijakan, karakteristik badan – badan pelaksana, kondisi – kondisi ekonomi, politik, dan sosial, dan sikap para pelaksana. Berikut adalah uraian setiap variabel implementasi kebijakan pertanian organik di Kota Batu:

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para

pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Sesuai dengan yang sedang terjadi di Kota Batu belakangan ini dalam bidang pertanian di Kota Batu mengalami permasalahan. Masalah yang dihadapi Kota Batu yaitu degradasi/penurunan kualitas tanah dan produktivitas tanah,tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida, adanya residu pestisida pada tanah dan produk hortikultura, tingginya biaya pertanian dan globalisasi produk pertanian. Dengan permasalahan yang ada maka pemerintah Kota Batu mengimplementasikan kebijakan dari Visi Misi Kota Batu yaitu : Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional. Visi Misi tersebut menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan program Pengembangan Kawasan pertanian organik untuk mengatasi masalah yang terjadi di Kota Batu. Setelah Visi Misi tersebut dijadikan program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik diturunkannya suatu SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu nomor: 180/157/KEP/422.110/2014. Dengan tujuan pengembangan kawasan pertanian organik bisa mencapai 14 titik kawasan.

Awal mulainya program Pemerintah Kota Batu hanya menarget 4 titik kawasan lalu berkembang menjadi 6 titik kawasan dan sampai sekarang menjadi 14 titik kawasan. Untuk mencapai hasil produksi dan produktifitas pertanian peningkat, Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dapat terkendali, ekosistem dan ekologi terjaga, mutu harga terjaga dan berdaya

saing, keindahan alam terjaga sehingga pariwisata meningkat. Pemerintah Kota Batu telah mengatur aspek apa saja yang menunjang keberhasilan implementasi Pengembangan Kawasan pertanian organik sesuai dengan Visi Misi Kota Batu. Program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik juga mengantisipasi petani untuk terhindar dari bahan – bahan kimia yang bisa menyebabkan penyakit 10 – 20 tahun tahun mendatang.

b. Sumber – sumber Kebijakan

Di samping ukuran – ukuran dasar dan tujuan – tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber – sumber yang tersedia. Pada serangkaian sumber – sumber jika dilihat berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn oleh Subarsono (2013:99) bahwa: sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non- manusia (*non-human resources*). Menurut Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu nomor: 180/157/KEP/422.110/2014 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pendampingan Kawasan Organik Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura Organik Program Pengembangan Pertanian Organik Tahun Anggaran 2014, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu menimbang: bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura Organik, pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, maka dipandang perlu menunjuk Tenaga Ahli

Pendamping Kawasan Organik di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Keputusan tersebut juga untuk membantu tingkat berhasilnya suatu implementasi kebijakan. Hasil wawancara yang di dapat dari beberapa stakeholder, Pemerintah Kota Batu juga memberikan bantuan sarana dan prasarana ini berhubungan dengan organik, di backup oleh pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian. Mulai dari bibit, pestisida nabati, pupuk organik, sampai dengan kegiatan – kegiatan yang lain yaitu SL lapang, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan pembuatan pupuk sendiri yang berhubungan dengan pertanian organik. Pemerintah terus mengupayakan yang menjadi kendala petani untuk pertanian organik. Menurut data yang di dapat peneliti dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu bahwa masalah yang tengah dihadapi yaitu:

1. Kualitas SDM dan kepedulian terhadap lingkungan masih rendah; sehingga sulit merubah pola pikir budidaya pertanian konvensional menjadi pertanian organik terutama di kalangan petani;
2. Kualitas dan kuantitas SDA Kota Batu semakin menurun (misal tingginya alih fungsi lahan, penurunan debit mata air, penurunan kualitas tanah, meledaknya serangan OPT, dll);
3. Kurang kuatnya kelembagaan petani (misal manajemen kelembagaan);
4. Kurangnya integrasi antar SKPD dalam mendukung pelaksanaan penerapan pertanian organik di Kota Batu;

5. Belum ada legalitas perlindungan kawasan yang dibentuk;
6. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang di sebagian wilayah kawasan organik;
7. Adanya kendala teknis, meliputi:
 - penurunan hasil panen pada masa peralihan,
 - serangan hama dan penyakit tanaman,
 - rentannya kontaminasi bahan kimia melalui air dan udara,
 - persepsi dan tuntutan petani terhadap harga jual yang tinggi pada produk organik
8. Lemahnya jaringan kelembagaan dan pemasaran produk pertanian organik

Dinas Pertanian Kota Batu mengupayakan masalah yang tengah dihadapi dengan terus memberikan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan bimtek, bahkan Dinas Pertanian Kota Batu juga mencari solusi pasar untuk petani organik, karna untuk beberapa petani organik yang tidak konsekuen terhadap kebijakan pertanian organik tersebut.

Dilihat dari teori Van Meter dan Van Horn sumber – sumber kebijakan di iringi sumberdaya manusia maupun sumber daya non manusia maka pemerintah Kota Batu sudah memberikan dukungannya kedua hal tersebut.

c. Karakteristik Badan – badan Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi

dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma – norma, dan pola – pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang sudah peneliti sajikan pada hal 105, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Dalam menjalankan tugasnya. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu mempunyai struktur organisasi dalam birokrasi untuk membagi tugas dan fungsi sebagai penyelenggara kebijakan Dinas Pertanian Kota Batu merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mempunyai gambaran pelayanan SKPD, menguraikan tentang Struktur Organisasi SKPD, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Kondisi Umum Pembangunan Pertanian dan Kehutanan 5 (lima) tahun terakhir. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Hal itu sesuai dengan kinerja instansi yang terkait di bidang pertanian yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu bahwa kebijakan yang dilakukan yaitu pada implementasi budidaya pertanian organik. Pembentukan kawasan organik sebagai *pilot project* yang artinya sebagai contoh daerah lain untuk berubah ke pertanian organik dengan memperhatikan komoditas unggulan yang ada di daerah. Sehingga masyarakat berperan penting dalam suatu keberhasilan program kebijakan pertanian organik tersebut. Oleh sebab itu Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang sudah memiliki bidang keahlian masing – masing harus ekstra memberi inovasi yang bisa membuat masyarakat petani Kota Batu lebih tertarik dan konsekuen

terhadap program pengembangan kawasan. Karena jika para pelaksana terus berkurang program Pengembangan Kawasanpun belum bisa dikatakan cukup berhasil.

d. Kondisi – kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok – kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975). Untuk menilai kineja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik. Sehingga lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Jika dilihat dari kondisi ekonomi pemerintah Kota Batu membantu dalam pengelolaan pertanian berorganik baik stan, edaran penjualan, maupun asosiasi, sehingga biaya pengeluaran petani sangat sedikit dan maka hasil yang didapat juga banyak menguntungkan. Tetapi kenyataannya petani organik di Kota Batu belum menemukan pasar dari hasil panennya, karena hanya sedikit yang dibantu oleh Dinas Pertanian, pemerintah belum menemukan solusi untuk pasar, namun walaupun membantu petani hanya beberapa dari hasil panen tetapi bisa menjualkan harga 3x lipat dari petani

konvensional. sehingga sementara mereka menjual sisa hasil panen pertanian organik sama seperti petani konvensional. Jadi dari sisi Dilihat dari dari kondisi sosial, dan politik, pemerintah Kota sangat mempengaruhi program dibawahnya. Contoh pertanian organik jika pertanian organik tidak menjadi visi misi tidak menjadi program suatu daerah program pertanian organik hanya dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan petani atau gapoktannya, atau mungkin dinasnya saja sebagian kecil dari program. tetapi jika program menjadi inti program pemerintah daerah bahkan kalo menjadi visi misi, sehingga tidak hanya program prioritas, tetapi dia sudah menjadi visi dengan demikian jika sudah menjadi visi otomatis menjadi prioritas dan menjadi prioritas otomatis ada program atau sumber pendanaan yang dikontribusikan untuk program itu. Sehingga itu lebih cepat tingkat keberhasilannya lebih cepat lebih massif lebih komprehensif kalo itu memang menjadi satu kebijakan pemerintah Kotanya. Pemerintah Kota Batu sudah sepenuhnya membantu baik jika dilihat dari kondisi politik maupun kondisi sosialnya, yang dibantu dengan para ahli untuk membantu para pelaksana kebijakan. Sehingga kondisi – kondisi sosial dan politik juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik tersebut.

e. Sikap para Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yakni; a) respons implementor terhadap

kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut (van Meter dan Van Horn : 1975). Melihat dari respon implementor terhadap kebijakan bahwa beberapa petani di Kota Batu menerima kebijakan tersebut dan sebagiannya menolak karena pola pikir berbeda – beda sehingga Dinas Pertanian mengupayakan dengan terus memberikan pelatihan dan mengadakan sosialisasi terhadap petani yang balik ke pertanian konvensional. Tidak hanya itu Dinas Pertanian juga mencari solusi permasalahan petani dengan belum menerimanya pertanian organik. Petani yang sudah disosialisasi paham akan program Kebijakan Pertanian tersebut, untuk kepentingan petani sendiri dan mendukung tingkat keberhasilan visi dan misi Kota Batu. Menurut petani di Kota Batu dengan adanya program Kebijakan Pertanian Organik ini sangat menarik dan membantu petani – petani di Kota Batu, namun kendala yang tengah dihadapi oleh para petani belum terpecahkan, sehingga petani yang awalnya mengikuti Kebijakan Pertanian Organik ini pun sebagian juga masih menggunakan bahan – bahan kimia. Sehingga melihat hal itu petani lain yang akan ikut pun harus berpikir dulu untuk mengikuti program kebijakan tersebut. Melihat sikap para pelaksana kebijakan ini pun Pemerintah Kota Batu harus segera menemukan jalan keluar dari kendala – kendala yang ada, seperti pasar. Karena sikap para pelaksana sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari Kebijakan

Pertanian Organik. masyarakat petani merupakan faktor utama yang menjalankan implementasi sistem pertanian organik. Apabila sumberdaya alam sudah memadai tetapi sumber daya manusia tidak mendukung akan sia-sia karena dalam pengolahan lahan pertanian organik tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya peran dari implementasi kebijakan.

f. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan – kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Batu selama ini sudah berjalan dengan baik dalam implementasi kebijakan pertanian organik, baik dengan Petugas Penyuluh Lapang, akademisi, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Kelompok Tani, maupun masyarakat luas. Dinas pertanian Kota Batu menyampaikan informasi kepada masyarakat luas tentang budidaya pertanian organik melalui sosialisai atau penyuluhan yang dilakukan dinas pertanian Kota Batu setiap minggunya. Dinas pertanian Kota Batu memberikan informasi tata cara budidaya pertanian dengan baik, informasi dampak kesehatan tentang bahaya residu kimia kepada masyarakat. Komunikasi merupakan faktor yang penting untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan kepada masyarakat luas. Komunikasi kebijakan dilakukan untuk menyampaikan informasi kebijakan yang didalamnya terdapat tujuan dan sasaran untuk ditujukan kepada kelompok sasaran kebijakan agar kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2011: 158-168) Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran – ukuran

dan tujuan – tujuan dipahami oleh individu – individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran – ukuran dasar dan tujuan – tujuan kebijakan. ketetapan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsisten atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan – tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Tetapi Beberapa para pelaksana tidak konsisten dengan tujuan kebijakan tersebut karena alasan tertentu seperti pemerintah Kota Batu belum memiliki pasar sendiri sehingga akan sulit bagi petani untuk memasarkan hasil panen mereka. walaupun sudah di bantu Dinas Pertanian menjualkan produk petani namun para petani belum puas karena menurut mereka Dinas hanya menjualkan sedikit demi sedikit hal tersebut merugikan bagi para petani hasil panen mereka bisa membusuk jika harus menunggu. Dengan adanya beberapa petani yang tidak konsisten terhadap ukuran dan tujuan kebijakan, Dinas Pertanian terus mengerahkan PPL (Petugas Penyuluh Lapang) untuk melakukan sosialisasi dengan merubah perilaku petani (pengetahuan, sikap, dan ketrampilan).

2. Hasil implementasi kebijakan pertanian organik, meliputi:

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pertanian organik di Kota Batu dilihat dari beberapa sudut pandang, pertama dilihat dari tersertifikasinya titik kawasan yang dituju. Kota Batu sendiri memiliki potensi alam yang besar. Sampai saat ini pemerintah masih melakukan penyuluhan untuk memperluas titik kawasan. tujuan dan sasaran titik kawasan pertanian organik di mulai dari 4 titik kawasan (desa Pendem,

Torongrejo, Sumber rejo, dan Sumber brantas). Dan meningkat menjadi 6 titik kawasan (desa Pendem, Torongrejo, Sumber rejo, Sumber brantas, Giripurno, dan Tulungrejo). Pemerintah Kota Batu melihat bahwa titik kawasan bisa terus meningkat dan semua tersertifikasi, sehingga diperluas menjadi 14 titik kawasan (desa Pendem, Torongrejo, Sumber rejo, Sumber brantas, Giripurno, Tulungrejo, Junrejo, Kel. Temas, Dadaprejo, Beji, Mojorejo, Sisir, Pandanrejo, dan desa Gunungsari). Tersertifikasinya semua titik kawasan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu berharap adanya perubahan terhadap pertanian organik. Sehingga bisa meningkatkan ekonomi bagi pertanian organik. Namun kenyataan dilapangan petani banyak yang kembali ke konvensional, sehingga SDM menurun dan Dinas Pertanian perlu mengevaluasi kembali program pengembangan kawasan pertanian organik tersebut. Yang ditemukan di lapangan petani belum menemukan pasar dan sebagian petani yang tanahnya belum organik membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi organik. Setiap kebijakan maupun program yang di implementasikan memang membutuhkan waktu untuk beradaptasi sehingga dengan terjadinya suatu permasalahan seperti belum menemukan pasar dan banyak petani yang mengeluh karena masa konversi yang sangat lama membutuh waktu untuk beradaptasi pada masyarakat tani. Dan Dinas perlu terus mengadakan baik sosialisasi, pelatihan maupun pendampingan sehingga petani tau, mengenal secara baik pertanian organik. Keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat dilihat dari proses pencapaian hasil akhir tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai.

Keberhasilan implementasi kebijakan di tentukan oleh dua hal yaitu: isi kebijakan dan lingkungan implementasi (Grindel, 1980). Dinas

Pertanian dan Kehutanan Kota Batu juga menganggap dengan adanya penyuluhan bisa memperkenalkan pentingnya pertanian organik, sehingga kedepannya akan mempermudah atau mendukung program pengembang kawasan pertanian organik. Pemerintah Kota Batu mengupayakan mengubah pola pikir petani yang ada di Kota Batu dengan stakeholder (Petugas Penyuluh Lapang, Akademisi, Pengendali OPT) dan pendukung lainnya adalah potensi alam yang ada dan kebijakan Pemerintah Kota Batu yang tercantum dalam peraturan walikota Batu nomor 22 tahun 2014 tentang sistem pertanian organik dan RPJMD 2012 – 2017 yang diharapkan mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Batu. Berikut hasil implementasi kebijakan pertanian Kota Batu:

a. Antisipasi kerusakan tanah

Strategi penggunaan atau pemanfaatan lahan di daerah tropika pada saat ini justru mempercepat proses terjadinya penurunan kualitas tanah atau degradasi yaitu akibat penggunaan tanah yang sangat intensif dengan melakukan praktik pengolahan tanah yang intensif atau konvensional (Simanjuntak, 2006). Pada pengolahan tanah secara konvensional yang banyak dilakukan petani dengan membajak dan membalikkan tanah hingga dilakukan berkali-kali selain merusak struktur tanah juga memacu oksidasi tanah sehingga dekomposisi

bahan organik tinggi. Akibat lebih lanjut residu bahan organik tanah semakin habis. Inilah yang menyebabkan erosi semakin diperbesar dan terjadinya degradasi tanah. Terjadinya degradasi tanah adalah akibat menurunnya kualitas tanah (Simanjuntak, 2006). Sebelum adanya program kebijakan pertanian organik tidak banyak petani Kota Batu cara bertaninya dengan organik, oleh sebab itu Pemerintah Kota Batu membuat kebijakan pertanian organik untuk menjaga kesuburan tanah di masa yang akan datang, lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Sehingga Dinas Pertanian dan kehutanan Kota Batu membantu mensukseskan kebijakan tersebut dengan membuat program pengembangan kawasan kebijakan pertanian organik. Setiap pertanian organik di Kota Batu mempunyai cara sendiri – sendiri untuk menjaga tanahnya agar tetap subur dan aman bagi lingkungan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Winardi bahwa beliau merawat dan menjaga kesuburan tanah dengan cara menanam jahe, cabe, bahkan sampai dengan kayu. Supaya untuk kedepannya tanaman tetap subur dan hasil panennya lebih sehat di konsumsi. disisi lain, setiap petani yang mengimplementasikan kebijakan pertanian organik juga mendapat bantuan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu baik dari bibit organik, pupuk, maupun alat – alat pembuatan pupuk. Menurut pengendali OPT, dengan pembuatan pupuk sendiri bisa menghemat biaya pengeluaran dan pupukpun berbahan organik. Berbeda dengan Bapak Solikin, beliau mengaplikasikan tanamannya dengan cara semi organik,

dibawah menggunakan pupuk kandang dan di atasnya menggunakan bahan kimia. Karena menurut beliau hal tersebut menguntungkan baginya selain hasil panen yang di dapat lebih cepat buahpun juga menarik. Tidak asing bagi para Petani masa konversi peralihan lahan dari semi organik maupun anorganik berpindah ke organik membutuhkan waktu yang sangat lama, karena harus menunggu tanah benar – benar tidak tercemar bahan kimia. Oleh sebab itu sulit bagi petani yang lahannya sedikit maupun lahannya sewa ikut program kebijakan pertanian organik.

b. Lingkungan Hidup

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut laporan akhir evaluasi program pertanian organik di Kota Batu Pertanian organik memandang alam secara menyeluruh, komponennya saling bergantung dan menghidupi, dan manusia ada di dalamnya. Pengembangan pertanian organik secara teknis harus disesuaikan dengan prinsip dasar lokalitas. Artinya pengembangan pertanian organik harus disesuaikan dengan daya adaptasi tumbuh tanaman/binatang terhadap kondisi lahan, pengetahuan lokal teknis perawatannya, sumber daya pendukung, manfaat sosial tanaman/ binatang bagi komunitas. Dalam pelaksanaanya, sistem pertanian organik sangat memperhatikan

kondisi lingkungan dengan mengembangkan metodi budi daya dan pengolahan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Sistem pertanian organik diterapkan berdasarkan atas interaksi tanah, tanaman, hewan, manusia, mikroorganisme, ekosistem, dan lingkungan dengan memperhatikan keseimbangan dan keanekaragaman hayati. Sistem ini secara langsung di arahkan pada usaha meningkatkan proses daur ulang alami daripada usaha merusak ekosistem pertanian (agroekosistem).

Sedikit petani Kota Batu yang sadar pentingnya pertanian organik bagi kesehatan dan lingkungan sekitarnya, dan kesuburan tanah kedepannya tetap terjaga. Karena pertanian organik bukan hanya di masa sekarang namun juga untuk di masa yang mendatang. Berbeda dengan petani yang banyak menggunakan bahan – bahan organik/pupuk kimia. Petani yang rentan menggunakan pupuk kimia dikemudian hari akan mengurangi kesuburan tanah. Lingkungan hidup merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi ini, sebab kita semua dapat hidup dengan baik jika lingkungan hidup itu sendiri menjadi baik sehingga kita sebagai manusia akan merasa nyaman dalam menjalani kehidupan (ato basahona, 2016).

Jika para petani menggunakan pupuk alami, manfaat yang diperoleh cukup besar selain baik untuk tanaman juga akan baik bagi tanah dan lingkungan sekitar dan dapat diandalkan untuk jangka panjang. Pupuk organik bisa menjadi opsi pilihan petani untuk bisa meningkatkan

produktifitas pertaniannya tetapi tetap berpijak pada unsur ramah lingkungan. Dalam Permentan No.2 tahun 2006 tentang pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk organik didefinisikan sebagai pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah (Fachrur Rozi Nasution, 2014)

c. Kesejahteraan masyarakat

Tujuan kebijakan pertanian organik disisi lainnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat/petani. Dalam laporan akhir evaluasi program pertanian organik Kota Batu, keberhasilan pembangunan pertanian selama ini telah memberikan dukungan yang sangat tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, namun demikian disadari balik keberhasilan tersebut terdapat kelemahan – kelemahan yang perlu di perbaiki. Sebelum itu program pengembangan kawasan pertanian organik dikatakan berhasil karena setiap titik kawasan sudah tersertifikasi, dan sudah ada petugas penyuluh lapang disetiap minggu yang akan membantu kesulitan/kendala petani organik yang mengimplementasikan kebijakan tersebut, dan akan membagikan bantuan pupuk dan bibit – bibit organik kepada setiap petani organik. Pada kenyataan yang ada tingkat SDM menurun, karena petani merasa rugi jika membutuhkan waktu yang lama dan pasar sampai dengan saat ini belum jelas. Menurut beberapa petani yang mengimplementasikan

program pertanian organik, hasil yang dipanen masih kalah dengan petani anorganik. Baik dari segi ukuran maupun warna. Menurut petani hal tersebut sangat merugikan baginya. Terdapat tiga aspek yang bisa menunjukkan indikator (penciri atau penanda) kesejahteraan petani, yaitu : (1) Perkembangan struktur pendapatan, (2) Perkembangan pengeluaran untuk pangan, (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani (M.fakri Guswandi, 2013). Melihat tiga aspek tersebut Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu terus membantu dalam mulanya pertanian organik tersebut mulai dari alat, pupuk, hingga bibit sampai dengan menjadi petani mandiri. Hal ini untuk mengurangi pengeluaran petani dan menambah pendapatan di masa yang akan datang. Dari segi sertifikasi gapoktan sudah terbantu dengan hasil panen mereka, sehingga bisa lebih terpercaya. Namun kenyataan pada pasar bahwa tidak semua hasil panen mereka bisa terjual atau di ditarik oleh mitra – mitra tertentu. Dari Dinas Pertanian dan kehutanan Kota Batu juga masih mencari solusi untuk pangsa pasar pertanian organik di Kota Batu sehingga bisa menarik petani lain gabung dalam program pengembangan kawasan pertanian organik tersebut. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu masih mengupayakan bisa memecahkan permasalahan yang tengah terjadi dalam pertanian organik, sehingga program ini akan terus berlanjut untuk mensukseskan agro wisata internasional yang berkarakter, berdaya saing, dan sejahtera (batukota.go.id)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Pertanian Organik pada Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kota Batu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pertanian Kota Batu Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu
 - a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan – tujuan kebijakan Pertanian Organik di programkan karena Pemerintah Kota Batu berharap Pertanian di Kota Batu berbasis Kepariwisataaan, disini lain bila menggunakan bahan kimia dilakukan secara terus menerus maka akan terjadi kerusakan tanah, hasil panen yang didapat juga tidak sehat bagi konsumen. Sehingga Pemerintah Kota Batu membuat Program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik. Program Pengembangan Kawasan tersebut ditarik dari Visi Misi Kota Batu, kemudian dijadikan program oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Sebelum program dijalankan Program tersebut dikaji oleh Bappeda sehingga program ini sudah dianggap layak untuk di implementasikan.
 - b. Sumber – sumber Kebijakan

Implementasi Pengembangan Kawasan didukung dengan keterlibatan stakeholder's yang ada, yang dikerjasamakan dengan Petugas Penyuluh Lapang (PPL), akademisi, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), dan LeSOS untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi petani yang belum mengerti pertanian organik. Selain itu Dinas Pertanian juga mendukung diberikan pupuk organik, bibit, dan alat – alat pembuat pupuk sendiri. Sumber daya – sumber daya yang di butuhkan oleh petani untuk menanggulangi isu kerusakan tanah dan pengembalian lahan ke tanah yang subur cukup terpenuhi.

- c. Komunikasi antar Organisasi dan kegiatan – kegiatan pelaksana
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu mengkomunikasikan Program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik dengan melalui Petugas Penyuluh Lapang (PPL) memberikan arahan maksud dan tujuan ukuran – ukuran dasar dan tujuan – tujuan kebijakan kepada masyarakat. dibantu akademisi dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), disosialisasikan, pelatihan, bimtek, sampai dengan pembuatan pupuk kompos sendiri

- d. Karakteristik Badan – badan pelaksana

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu membuat struktur organisasi dalam birokrasi untuk membantu masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan pertanian organik di Kota Batu,

karena petani Batu masim awam dengan pertanian organik dan belum sepenuhnya mengerti cara merawat, pupuk apa saja yang bisa digunakan, dan bagaimana cara penanaman yang betul untuk petani organik. Dinas Pertanian terus mengupayakan agar terjalin sinergi antara pemerintah dan jajaran dengan para implementasi kebijakan (petani) untuk mencapai suatu keberhasilan program pengembangan kawasan.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Melihat dari kondisi ekonomi, jika dibandingkan pertanian konvensional dengan petani organik maka perubahan ekonomi akan naik diukur dari biaya yang dikeluarkan jauh berbeda, bahwa petani konvensional mengeluarkan biaya – biaya untuk membeli pupuk pestisida kimia atau pupuk kimia sedangkan petani organik membuat pupuk sendiri dari bahan alam yang dibantu dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Harga pasarpun juga berbeda, bahan organik sangat sehat dan baik untuk dikonsumsi sehingga harga jualpun lebih mahal dari petani konvensional. Namun bagi petani yang belum mendapatkan sertifikasi LeSOS akan kesulitan dalam memasarkan hasil panennya. Melihat dari kondisi sosial, dan politik Pemerintah Kota Batu sudah berpartisipasi dalam bentuk stakeholder atau para ahli yang terlibat, dalam bentuk memberi pengetahuan seputar pertanian organik dan pelatihannya.

f. Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*)

Sampai dengan saat ini sebagian petani menerima dan mau melaksana program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik, namun sebagian lagi petani yang mau melaksanakan program tersebut tidak konsekuen dengan kebijakan tersebut karena menurut petani Kota Batu belum menemukan solusi dari pasar, sehingga petani bimbang. Hal ini sangat mempengaruhi petani lain yang belum mengikuti program tersebut.

2. Hasil implementasi kebijakan pertanian organik untuk mengantisipasi isu kerusakan tanah, lingkungan hidup disisi lain untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik dikatakan cukup berhasil dilihat dari titik kawasan yang dituju yang sudah tersertifikasinya semua titik kawasan. Namun jika dilihat secara luas Program tersebut masih memerlukan usaha yang ekstra dari Dinas Pertanian Kota Batu, karena beberapa petani yang mengikuti program Pengembangan Kawasan Pertanian Organik sebagian tidak konsekuen, sehingga mempengaruhi petani lain yang masih petani konvensional. Dari tersertifikasinya 14 kawasan tersebut Dinas berharap sudah adanya perubahan terhadap masyarakat tani di Kota Batu. Namun kenyataan di lapangan masih ada juga petani yang kembali ke pertanian anorganik, sehingga Dinas Pertanian mengevaluasi kembali program pengembangan pertanian organik terus mengerahkan Petugas Penyuluh Lapang dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan untuk terus memberikan pelatihan

dan apa yang dibutuhkan oleh para petani di Kota Batu. sehingga Dinas Pertanian dan Kehutanan mengevaluasi kembali pengembangan pertanian organik di Kota Batu sebagai berikut:

a. Antisipasi Kerusakan lingkungan

Pertani di Kota Batu memiliki cara sendiri – sendiri untuk menjaga tanah maupun lingkungan sekitar agar tetap sehat dan lingkungan terjaga, dari menanam cabe jahe, dll untuk ditumpangsarikan supaya kesuburan tanah tetap terjaga. Dari Dinas pertanian dan Kehutanan Kota Batu juga membantu mulai dari pupuk, pelatihan pembuatan pupuk dan sampai dengan diberikan alat – alat pembuat pupuk, hal ini untuk meminimalisir pengeluaran petani. supaya petani yang masih dalam masa konversi tidak banyak pengeluarannya, dan rugi. Minim bagi petani sadar bahwa pentingnya pertanian organik bagi kesehatan maupun bagi lingkungan sekitar, sehingga sampai saat ini belum semua masyarakat tani di Kota Batu mengikuti kebijakan pertanian organik. Namun ada juga petani yang masih dalam masa konversi, sehingga ,

b. Lingkungan Hidup

Selain dari menjaga kerusakan lingkungan kebijakan pertanian organik pada tanah dan di masa yang akan datang juga untuk kesehatan bagi makhluk hidup yang tinggal disekitarnya. Disisi lain pertanian organik bisa meminimalisir pengeluaran, karena pertanian organik menggunakan pupuk alami bisa memanfaatkan kotoran hewan dan limbah disekitar. Ada juga yang sadar untuk

kesehatan bagi petani itu sendiri. Namun tidak banyak yang peduli akan kesehatan pada diri sendiri. Ada juga petani yang tetap ingin menggunakan pupuk kimia, karena menurut salah satu sample peneliti yaitu Bapak Solikin dengan caranya bertani adalah sudah sangat menguntungkan baginya mulai dari segi bentuk maupun warna sehingga masih menggunakan semi organik.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan pertanian organik di Kota Batu tentu tidak jauh dari kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pertanian organik mulai di kenalkan kepada petani dengan penyuluhan dan Pemerintah Kota Batu juga memberikan pelatihan – pelatihan supaya petani di Kota Batu untuk ke depannya bisa lebih mandiri dengan pertanian organik. Sedikit bagi petani program ini sangat menguntungkan maupun bisa dikatakan sejahtera karena lahannya yang sangat luas. Namun bagi petani yang lahannya sempit maupun sewa mereka lebih memilih kembali ke pertanian anorganik. Walaupun sudah mendapat sertifikasi namun pasar belum jelas, sehingga petani juga harus lebih mandiri.

Program pengembangan kawasan pertanian organik sampai dengan saat ini belum di rasa mencukupi ekonomi masyarakat petani di Kota Batu, karena hanya tersertifikasinya lahan saja belum cukup, walaupun pengajuan sertifikasi pertanian organik biayanya cukup mahal. Hasil input dari implementasi kebijakan pertanian organik adalah mendapatkan pelatihan sosialisasi, dan pendampingan pada

setiap 14 titik kawasan karena pemula perlu adanya pelatihan sehingga kedepannya bisa menjadi mandiri, disisi lain bisa mendapatkan sertifikasi pertanian organik, petani bisa langsung memakai label organik disetiap kemasan hasil panennya, sedangkan hasil dari outcome implementasi kebijakan pertanian organik, blum cukup meningkatkan ekonomi masyarakat Karena masalah pasar belum jelas sehingga SDM menurun dan program pengembangan kawasan pertanian organik perlu solusi daripada pasar tersebut. Oleh sebab itu, Dinas mengevaluasi kembali pertanian organik dan mengupayakan pasar pada pertanian organik / program pertanian dengan bekerjasama dengan mitra tertentu.

B. Saran

Pengimplementasian Kebijakan Pertanian Organik di Kota Batu masih terdapat kendala yang dihadapi, untuk itu perlu adanya solusi agar pelaksanaan pertanian organik di Kota Batu mendapati tujuan yang diinginkan serta Masyarakat dan Pemerintah mendapat dampak positif dalam implementasi kebijakan tersebut. Berikut beberapa saran yang diharapkan mampu membantu agar implementasi kebijakan pertanian organik di Kota Batu berjalan dengan baik, di antaranya adalah:

1. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu perlu menciptakan inovasi mengenai pemasaran hasil pertanian organik dengan cara setiap swalayan alfamidi atau tempat yang menjual sayur di beri peraturan

harus berbahan organik yang sudah mendapat label organik dari pemerintah, sehingga petani bisa langsung menemukan pasar mereka dan tidak menjual kepasar seperti hasil panen petani konvensional yang tidak ada bedanya

2. Dinas Pertanian dan Kehutanan dan stakeholder yang terlibat perlu terus melakukan sosialisasi atau terus berkomunikasi setiap minggunya dengan petani untuk terus memotivasi petani dan tujuan dari kebijakan tersebut bahwa program ini juga untuk kesejahteraan petani sendiri. Dan untuk di beberapa titik kawasan tidak hanya sekedar memberikan bantuan saja, namun pelatihan juga benar – benar diterapkan dalam masyarakat. Karena pelatihan juga mempengaruhi para petani untuk mengikuti program pengembang kawasan pertanian organik tersebut.
3. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu membuat program pengembangan kawasan kebijakan pertanian organik di beberapa titik kawasan. dan akan terus berlanjut di semua kawasan, hal ini juga seharusnya membuat kebijakan kepada semua market baik sayur maupun buah – buahan yang ada di Kota Batu harus bersertifikat organik. Sehingga kebijakan pertanian organik banyak diimplementasikan oleh masyarakat petani di Kota Batu. Karena kebijakan pertanian organik ini tidak hanya di masa sekarang tetapi juga untuk di masa yang akan datang, kesejahteraan masyarakat di Kota Batu pun juga terus berlanjut sampai di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press

_____. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Agustino, L. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*, Bandung : AIPI

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Procedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Data Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 2015

Farming.id di akses pada 5 juli 2018 12:40 dari <http://www.google.co.id/amp/s/farming.id/dinamika-pertanian-konvensional-dan-pertanian-modern/amp/>

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta

Peraturan Menteri No.2 tahun 2006 tentang pupuk organik

Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu nomor: 180/157/KEP/422.110/2014

Kerusakan Tanah di akses pada 30 maret 2017 14:22 dari <http://majalahpanderman.blogspot.o.id>

Lingkungan Hidup di akses pada tanggal 16 november 2018 <https://www.atobasahona.com/2016/11/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-ahli.html>

Mayrowani, Henny. Pengembangan Pertanian Di Indonesia. Diakses pada 10 maret 2017 18:33 dari <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi/forum-agro-ekonomi/409-forum-agro-ekonomi-vol-30-no-2-2013/2497-pengembangan-pertanian-organik-di-indonesia>

Memulai Usaha Pertanian Organik. Di akses pada 10 Maret 2017 18:40 dari <https://tigamalaikat.org/?m=201702>

Miles, M.B Hubberman, A.M 1984 *Analisis data Kualitatif*. Cetakan Pertama, UI Press. Jakarta

Miles, M.B Hubberman, A.M Saldana, Jhonny. 2013. *Qualitative data analysis: a methods source book*. SAGE Publication

Moleong, L.J. 2000. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya

Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Ghalia

- Nugroho, Riant.(2003) *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Peraturan Menteri No. 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik
- PERDA Kota Batu Nomor 7 tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu 2012 - 2017
- Profil Kota Batu Di akses pada 10 Maret 2017 18:50 dari <http://telecenterkartikamandirikotabatu.blogspot.co.id/>
- Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 2012 – 2017
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012 – 2017
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sektor Pertanian Serap Banyak Tenaga Kerja Di akses pada 31 Maret 2018 21:48 dari <http://www.google.co.id/amp/s/bisnis/.tempo.co/amp/872715/februari-2017-sektor-pertanian-serap-banyak-tenaga-kerja>
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Sutanto, Rachman. 2002. *Penerapan Pertanian Organik: Pemasarakatan & Pengembangannya*. Yogyakarta: Kanisius
- Tachjan, Dr. H, M.Si.2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang *pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup*
- Visi Misi Kota Batu 2018 di akses pada tanggal 19 november 2018 <http://website.batukota.go.id/statis-2-visi-dan-misi>
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media

Warsani, Henki. 2013. *Kajian Pemanfaatan Lahan Sawah Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Pendidikan Indonesia

Yusuf, A.Muri. 2014. *Metodelogi penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sumber lain:

Tesis

Fadlina, Inneke Meilina. 2013. *Perencanaan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Kajian tentang pengembangan pertanian organik di Kota Batu)*. Program Studi Magister Ilmu Administrasi publik, Universitas Brawijaya.



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Diajukan pada Dinas Pertanian

1. Sejak kapan adanya kebijakan pertanian organik?
2. Apakah yang melandasi kebijakan pertanian organik?
3. Siapa sajakah yang berperan dalam pertanian organik di Kota Batu? Dan apa perannya?
4. Bagaimanakah cara pemerintah Kota Batu khususnya Dinas Pertanian mensosialisasikan kebijakan tersebut?
5. Bagaimanakah ukuran dan tujuan kebijakan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan?
6. Bagaimanakah cara mengubah pola pikir petani untuk menerapkan pertanian organik?
7. Bagaimanakah dampak kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan pertanian organik?
8. Bagaimana sikap para pelaksana terkait tanggung jawab?
9. Bagaimanakah perencanaan yang dilakukan Dinas untuk pengembangan anggaran dan SDM pada pertanian organik?
10. Berapa lamakah implementasi kebijakan pertanian organik di nyatakan berhasil?

Diajukan pada petani organik

1. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kebijakan pertanian organik?
2. Berapalama Bapak menerapkan kebijakan pertanian organik? Apakah ada kendala dalam menerapkan kebijakan pertanian organik?

Diajukan pada petani organik

1. Dilihat dari tujuan program Pemerintah tentang pertanian organik ini memiliki banyak keuntungan, salah satunya ramah lingkungan dan hasil panen lebih sehat. Mengapa tetap menerapkan pertanian anorganik?

Lampiran 2

Curriculum vitae

Nama : Linda Kumalasari
NIM : 125030107111082
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 30 September 1992
Email : lindakumala92@gmail.com
Nomor Telepon : 081331260526
Pendidikan Formal : 1. TK Dharma Wanita 1990 – 2000
2. SDN Purwodadi 02 2000 – 2006
3. SMP Solaiman Batu 2006 – 2009
4. SMAN 02 Batu 2009 – 2012

